



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025

Laporan Kinerja

Instanti Pemerintah

SAKIP

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor
Jl. Dadali no. 4 Tanah Sareal Kota Bogor

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT , Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan hidayahNYa, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 sesuai waktu yang telah ditentukan. LKIP ini merupakan laporan yang di susun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk periode satu tahun. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025-2026

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai acuan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor

Demikian laporan ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Bogor, Februari 2026

**KEPALA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BOGOR,**

RAHMAT HIDAYAT,S.Sos.MM
NIP.197408181993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR	iii
EKSEKUTIF	
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	1.1.Latar Belakang
	2
	1.2.Maksud dan Tujuan
	2
	1.3. Struktur Organisasi.....
	2
	1.4. Sumber Daya Manusia (SDM).....
	3
	1.5. Isu Strategis.....
	8
	1.6. Cascading Kinerja.....
	8
	1.7. Peta Proses Bisnis.....
	10
	1.8. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
	2025.....
	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....
	14
	2.1. Renstra Strategis.....
	15
	2.2 Tujuan dan Sasaran.....
	16
	2.3. Perjanjian Kinerja
	16
	2.4. Anggaran Tahun 2025.....
	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....
	21
	3.1.Capaian Kinerja.....
	24
	3.2.Realisasi Anggaran Keuangan Berdasarkan
	Sasaran.....
	62
	3.3. Analisis Efisiensi.....
	67
BAB IV	PENUTUP.....
	70
	4.1. Kesimpulan.....
	70
	4.2. Rencana Tindak Lanjut.....
	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kebutuhan Sumberdaya ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.....	4
Tabel 2	Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025.....	12
Tabel 3	Tujuan dan Sasaran.....	15
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja beserta Target kinerja dan Anggaran Tahun 2025	17
Tabel 5	Program dan Anggaran Dinas.....	18
Tabel 6	Pagu Anggaran Dinas.....	19
Tabel 7	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel 8	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
Tabel 9	Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur organisasi.....	2
Gambar 2	Struktur organisasi UPTD Metrologi pada.....	4
Gambar 3	Penjenjangan Kinerja.....	9
Gambar 4	Peta Proses Bisnis.....	11
Gambar 5	Capaian Kinerja Presentase Koperasi Berdaya Saing.....	25
Gambar 6	Trend perkembangan Persentase Koperasi Berdaya Saing.....	26
Gambar 7	Capaian Kinerja UMKM Yang Produktif.....	28
Gambar 8	Trend Perkembangan Indikator UMKM Produktif.....	30
Gambar 9	Persentase peningkatan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitas promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan.....	31
Gambar 10	Trend Perkembangan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitas promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan	32
Gambar 11	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor.....	34
Gambar 12	Trend Perkembangan Peningkatan Nilai Ekspor.....	35
Gambar 13	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/sosialisasi.....	36
Gambar 14	Trend Persentase pemenuhan kebutuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan /Sosialisasi	37
Gambar 15	Sertifikat Kesesuaian Pasar Ber SNI Hasil Pembinaan.....	38
Gambar 16	Persentase pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usaha sesuai izinnya.....	40
Gambar 17	Trend Persentase pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usaha sesuai izinnya.....	41
Gambar 18	Tingkat Akurasi Ukuran Sarana Perdagangan.....	42
Gambar 19	Trend Tingkat Akurasi Ukuran Sarana Perdagangan.....	43
Gambar 20	Kota Bogor Sebagai Daerah Tertib Ukur.....	44
Gambar 21	Capaian Kinerja 2025 Tingkat Inflasi harga kebutuhan pokok dan barang penting.....	45
Gambar 22	Trend Tingkat Inflasi harga kebutuhan pokok dan barang penting..	46
Gambar 23	Capaian Kinerja IKM Berdaya Saing.....	49
Gambar 24	Trend Persentase IKM Berdaya Saing.....	50
Gambar 25	Capaian Kinerja Indikator Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	51
Gambar 26	Trend Nilai SAKIP.....	52
Gambar 27	Capaian Kinerja Kepatuhan Pengelola Keuangan.....	54
Gambar 28	Trend Kepatuhan Keuangan.....	55
Gambar 29	Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida.....	56

Gambar 30	Trend perkembangn Indeks Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK/Itda.....	57
Gambar 31	Capaian Kinerja Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (tingkat kematangan Inovasi > 100).....	58
Gambar 32	Trend Jumlah Inovasi Perangkat Daerah.....	60
Gambar 33	Capaian Indikator Survey Kepuasan Masyarakat.....	62
Gambar 34	Trend Survey SKM.....	63

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Kota Bogor Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja terhadap indikator sasaran yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2025 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. LKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja.

Analisis efisiensi pada laporan kinerja didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai lebih dari 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 8 (delapan) Sasaran yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ada terdapat 8 (delapan) sasaran yang capaian kinerjanya mencapai/melebihi target dengan tingkat efisiensi sebesar yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Kinerja **Sasaran Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah** dengan Indikator UMKM yang produktif terealisasi sebanyak 134 orang dari target 2025 sebanyak 133 orang dan tercapai sebesar 100,7% dengan perhitungan Jumlah UMKM yang Produktif dalam waktu 1 tahun berjalan, Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 2,28% atau setara dengan Rp. 4.060.000,-. (Empat Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
2. Tercapainya Kinerja Sasaran **Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri** dengan Indikator Persentase peningkatan jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan terealisasi sebesar 16,7% dari target 2025 sebesar 5% tercapai sebesar 321,4% dengan perhitungan Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi atau pemasaran dibagi Jumlah UMKM yang terverifikasi pada aplikasi SOLUSI dikali 100% .Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,07% atau setara dengan Rp. 20.772.139 ,-. (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
3. Tercapainya Kinerja Sasaran **Optimalisasi Perlindungan Konsumen** dengan indikator Tingkat Akurasi ukuran sarana perdagangan Data capaian kinerja pelaksanaan Tera/Tera Ulang Kota Bogor pada Tahun 2025 mencapai 107,17% dimana targetnya sebesar 31,38% dengan realisasi sebesar 33,63%

, dengan penghitungan Jumlah UTTP yang sudah ditera/Tera Ulang tahun ke n (2025) dibagi Jumlah Potensi UTTP dikali 100%.Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,99% atau setara dengan Rp. 72.900,-. (Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

4. Tercapainya Kinerja ***Terkendalinya harga kebutuhan pokok dan barang penting*** dengan Indikator Tingkat Inflasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting , dimana Perhitungan pada aplikasi Sadaya masih menggunakan perhitungan secara umum , yaitu Realisasi /Target di kali 100% $(4,19/3,65 \times 100\% = 114,52\%)$ Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,13% atau setara dengan Rp. 58.827.752 ,-. (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah
5. Tercapainya Kinerja Sasaran ***Meningkatnya IKM Berdayasaing*** dengan Persentase IKM Berdayasaing pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dari target 20,20 Persen mencapai 101,98% dari realisasi 20,60% hal ini dikarenakan intensnya falitasi bagi para IKM melalui pelatihan yang di adakan oleh Dinas maupun Kementrian Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,98% atau setara dengan Rp. 1.516.148,-. (Satu Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
6. Tercapainya Kinerja Meningkatnya ***Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah*** dengan Indkator Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah , Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah , Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada Tahun 2025 memperoleh nilai 88,95 dengan kriteria A (Memuaskan), sedangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya (2024) mendapatkan nilai sebesar 87,26 dengan kategori A (memuaskan), dengan tidak adanya anggaran ;
7. Tercapainya Kinerja ***Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah*** dengan Indikator Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pelayanan Daerah tercapai sebesar 100,71 % dari target 88,755 dan relaisasi 89,38 Persen, dengan tidak adanya anggaran.
8. Tercapainya Kinerja ***Optimalisasi Pembinaan pada Sektor Perdagangan*** dengan indikator Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya tersebut mempunyai Target 19,80% terealisasi 71,43 % dengan Capaian 369,76%, tanpa adanya anggaran

CAPAIAN KINERJA

Dinas , Koperasi, Usaha,Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah	Persentase Koperasi Berdaya Saing	18,94 Persen	17,16 Persen	90,6 Persen	Tinggi
		UMKM yang Produktif	133 Unit Usaha	134 Unit usaha	100,75 Persen	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran utk peningkatan penjualan	5 Persen	16,07 Persen	321,4 Persen	Sangat Tinggi
3	Optimalisasi Pembinaan pada Sektor Perdagangan	Persentase peningkatan nilai ekspor	8,10 Persen	2,72 Persen	33,58 Persen	Sangat Rendah
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/ Sosialisasi	5,80 Persen	3,65 Persen	62,9 Persen	Rendah
		Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya	19,80 Persen	71,43 Persen	360,76 Persen	Sangat Tinggi
4	Optimalisasi Perlindungan Konsumen	Tingkat Akurasi ukuran sarana perdagangan	31,38 Persen	33,63 Persen	107,17 Persen	Sangat Tinggi
5	Terkendalnya harga kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat Inflasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3,65 Persen	4,18 Persen	114,52 Persen	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya IKM Berdayasaing	Persentase Peningkatan IKM Berdayasaing	20,20 Persen	20,6 Persen	101,98 Persen	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	87,50 (Nilai)	88,95 (Nilai)	100,71 Persen	Sangat Tinggi
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95 Persen	92,03 Persen	96,87 Persen	Tinggi
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	91 Persen	100 Persen	109,89 Persen	Sangat Tinggi

		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat Kematangan Inovasi > 100)	1 Inovasi/PD	0	0	Rendah
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pelayanan Daerah	88,75 Persen	89,38 Persen	100,71	Sangat Tinggi

**Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kota Bogor
Tahun 2025**

No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)
1.	Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah	Persentase Koperasi Berdaya Saing	717.871.000	630.935.000	87,89
		UMKM yang Produktif	186.300.000	181.840.000	97.61
2.	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran utk peningkatan penjualan	307.451.500	286.679.361	93.24
3.	Optimalisasi Pembinaan pada Sektor Perdagangan	Persentase peningkatan nilai ekspor	32.126.000	24.926.000	77.59
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/ Sosialisasi	0	0	0
		Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya	0	0	0
4.	Optimalisasi Perlindungan Konsumen	Tingkat Akurasi ukuran sarana perdagangan	51.193.200	51.12.000.	99.86

No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)
5.	Terkendalinya harga kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat Inflasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	427.107.752	368.280.000	86,23
6.	Meningkatnya IKM Berdayasaing	Persentase Peningkatan IKM Berdayasaing	143.188.100	141.671.952	98.94
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	0	0	0
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	18.256.660.588	16.922.561.786.	92.69
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida			
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat Kematangan Inovasi > 100)	0	0	0
8.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pelayanan Daerah	0	0	0

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, dimana untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Penyusunan LAKIP didasarkan pada siklus anggaran yang berjalan selama 1 (satu) tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu Perangkat Daerah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase atau lainnya. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran. Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025- 2026 serta Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKIP Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 menjadi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Perangkat Daerah yaitu Kepala Dinas kepada Walikota. yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Maksud dan Tujuan

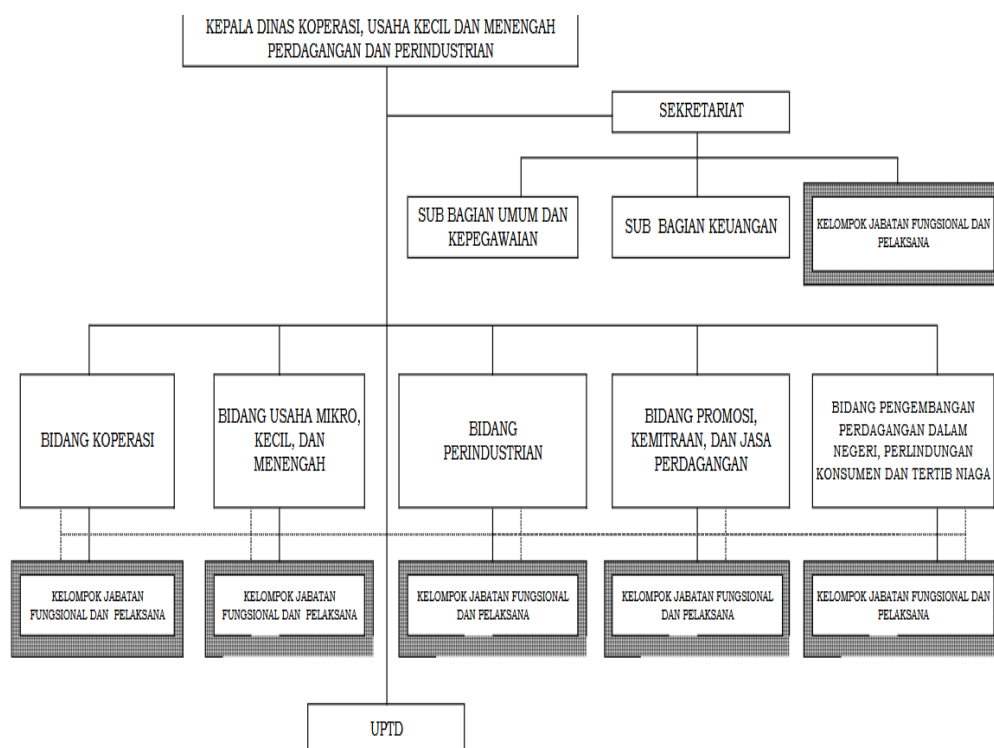
Maksud penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan capaian kinerja sasaran yang sudah ditetapkan di tahun 2025

Sedangkan tujuan penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 untuk memberikan gambaran yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kinerja

1.3. Struktur Organisasi

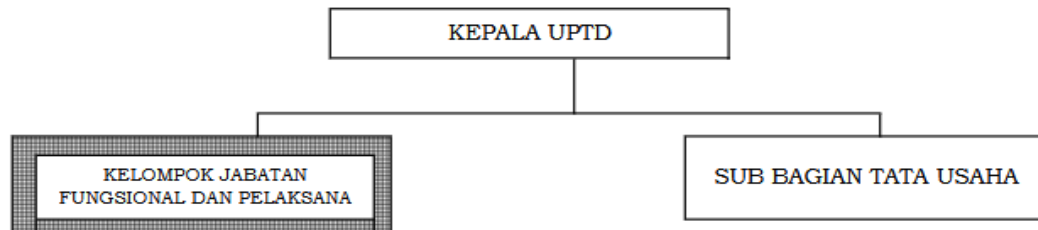
Terkait struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dapat dilihat pada Peraturan Walikota a Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dapat di lihat melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor



Gambar 2
Struktur organisasi UPTD Metrologi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor

UPTD METROLOGI LEGAL KELAS A



1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor didukung oleh Sumber daya. Sumber daya yang di miliki diantaranya adalah sumber daya manusia, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Jumlah pegawai yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada tahun 2025 adalah 82 pegawai, yang terdiri dari 59 ASN dan 23 Non PNS, dan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian didominasi oleh laki-laki sebanyak 55 pegawai, sementara perempuan hanya 27 pegawai. Jumlah pegawai dilihat dari sebaran Bidang tempat bertugas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Kebutuhan Sumberdaya ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM saat ini (s.d Agustus Tahun 2025)			Kebutuhan SDM s.d 2029			Selisih Kebutuhan SDM s.d Tahun 2029		
		PNS	PPPK	Total	PNS	PPPK	Total	PNS	PPPK	Total
1	Kepala	1		1	1		1	0		0
2	Sekretaris	1		1	1		1	0		0
3	Perencana Ahli Madya			0	1		1	1		1
4	Perencana Ahli Muda	1		1	1		1	0		0
5	Perencana Ahli Pertama			0	1		1	1		1
6	Arsiparis Pertama			0	1		1	1		1
7	Arsiparis Penyelia			0	1		1	1		1
8	Arsiparis Mahir			0	2		2	2		2
9	Arsiparis Terampil			0	2		2	2		2
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1	1		1	0		0
11	Kepala Sub Bagian Keuangan	1		1	1		1	0		0
12	Penelaah Teknis Kebijakan	3		3	4		4	1		1
13	Pengolah Data dan Informasi	1		1	4		4	3		3
14	Operator Layanan Operasional	1		1	1		1	0		0
15	Pengadministrasi Perkantoran	6		6	7		7	1		1
16	Tenaga Kebersihan		1	1		1	1		1	1
17	Tenaga Supir		1	1		1	1		1	1
18	Penata Layanan Operasional		1	1		1	1		1	1
19	Pengelola Layanan Operasional		1	1		1	1		1	1
20	Operator Layanan Operasional		4	4		4	4		4	4
21	Pengelola Umum Operasional		2	2		2	2		2	2
22	Kepala Bidang Koperasi	1		1	1		1	0		0
23	Pengawas Koperasi Ahli Madya	1		1	2		2	2		2
24	Pengawas Koperasi Ahli Muda	1		1	2		2	1		1

25	Pengawas Koperasi Ahli Pertama			0	1		1	1		1
26	Penelaah Teknis Kebijakan			0	4		4	4		4
27	Pengolah Data dan Informasi			0	1		1	1		1
28	Operator Layanan Operasional	1	1	2	1	1	2	0	1	1
29	Pengadministrasi Perkantoran	2		2	6		6	4		4
30	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1		1	1		1	0		0
31	Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya			0	2		2	2		2
32	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	2		2	3		3	1		1
33	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	1		1	4		4	4		4
34	Analisis Perdagangan Ahli Madya			0	1		1	1		1
35	Analisis Perdagangan Muda			0	2		2	1		1
36	Analisis Perdagangan Pertama			0	3		3	3		3
37	Penelaah Teknis Kebijakan			0	5		5	4		4
38	Fasilitator Perdagangan			0	1		1	1		1
39	Pengolah Data dan Informasi			0	1		1	1		1
40	Operator Layanan Operasional		1	1		1	1		1	1
41	Pengadministrasi Perkantoran	4		4	6		6	2		2
42	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1		1	1		1	0		0
43	Analisis Perdagangan Ahli Madya			0	1		1	1		1
44	Analisis Perdagangan Ahli Muda	2		2	2		2	0		0
45	Analisis Perdagangan Ahli Pertama			0	4		4	4		4
46	Pengawas Perdagangan Madya			0	1		1	1		1
47	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1	1		1	0		0

48	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama			0	1		1	1		1
49	Pengawas Kemetrollogian Madya			0	1		1	1		1
50	Pengawas Kemetrollogian Muda			0	1		1	1		1
51	Pengawas Kemetrollogian Pertama			0	1		1	1		1
52	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1	2		2	1		1
53	Fasilitator Perdagangan			0	2		2	2		2
54	Pengolah Data dan Informasi			0	1		1	1		1
55	Operator Layanan Operasional		1	1		1	1		1	1
56	Pengadministrasi Perkantoran	5		5	6		6	1		1
57	Pengelola Layanan Operasional		1	1		1	1		1	1
58	Kepala Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan	1		1	1		1	0		0
59	Analisis Perdagangan Ahli Madya			0	1		1	1		1
60	Analisis Perdagangan Ahli Muda	3		3	3		3	1		1
61	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	1		1	3		3	2		2
62	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya			0	2		2	2		2
63	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda			0	1		1	1		1
64	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama			0	1		1	1		1
65	Fasilitator Perdagangan	1		1	2		2	1		1
66	Penelaah Teknis Kebijakan			0	1		1	0		0
67	Pengolah Data dan Informasi			0	1		1	1		1
68	Operator Layanan Operasional		4	4		4	4		4	4
69	Pengadministrasi Perkantoran	3		3	3		3	0		0

70	Penata Layanan Operasional		1	1		1	1		1	1
71	Kepala Bidang Perindustrian	1		1	1		1	0		0
72	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya			0	2		2	2		2
73	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	2		2	2		2	0		0
74	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama			0	1		1	1		1
75	Pengawas Industri	2		2	2		2	0		0
76	Konsultan Industri			0	2		2	2		2
77	Pengolah Data dan Informasi			0	1		1	1		1
78	Pengadministrasi Perkantoran	2		2	3		3	1		1
79	Pengelola Layanan Operasional		1	1		1	1		1	1
80	UPTD Metrologi Legal	1		1	1		1	0		0
81	Kepala Bagian Tata Usaha			0	1		1	1		1
82	Penera Ahli Madya	1		1	2		2	1		1
83	Penera Ahli Muda	1		1	1		1			0
84	Penera Ahli Pertama			0	2		2	2		2
85	Penera Ahli Mahir			0	1		1	1		1
86	Penera Ahli Terampil			0	1		1	1		1
87	Penelaah Teknis Kebijakan			0			0			0
88	Pengolah Data dan Informasi			0			0			0
89	Operator Layanan Operasional		1	1		1	1		1	1
90	Pengadministrasi Perkantoran			0	1		1	1		1
91	Pengelola Layanan Operasional		2	2		2	2		2	2
JUMLAH		59	23	82	144	23	167	85	23	108

Sumber: BKPSDM Kota Bogor

1.5. Isu Strategis

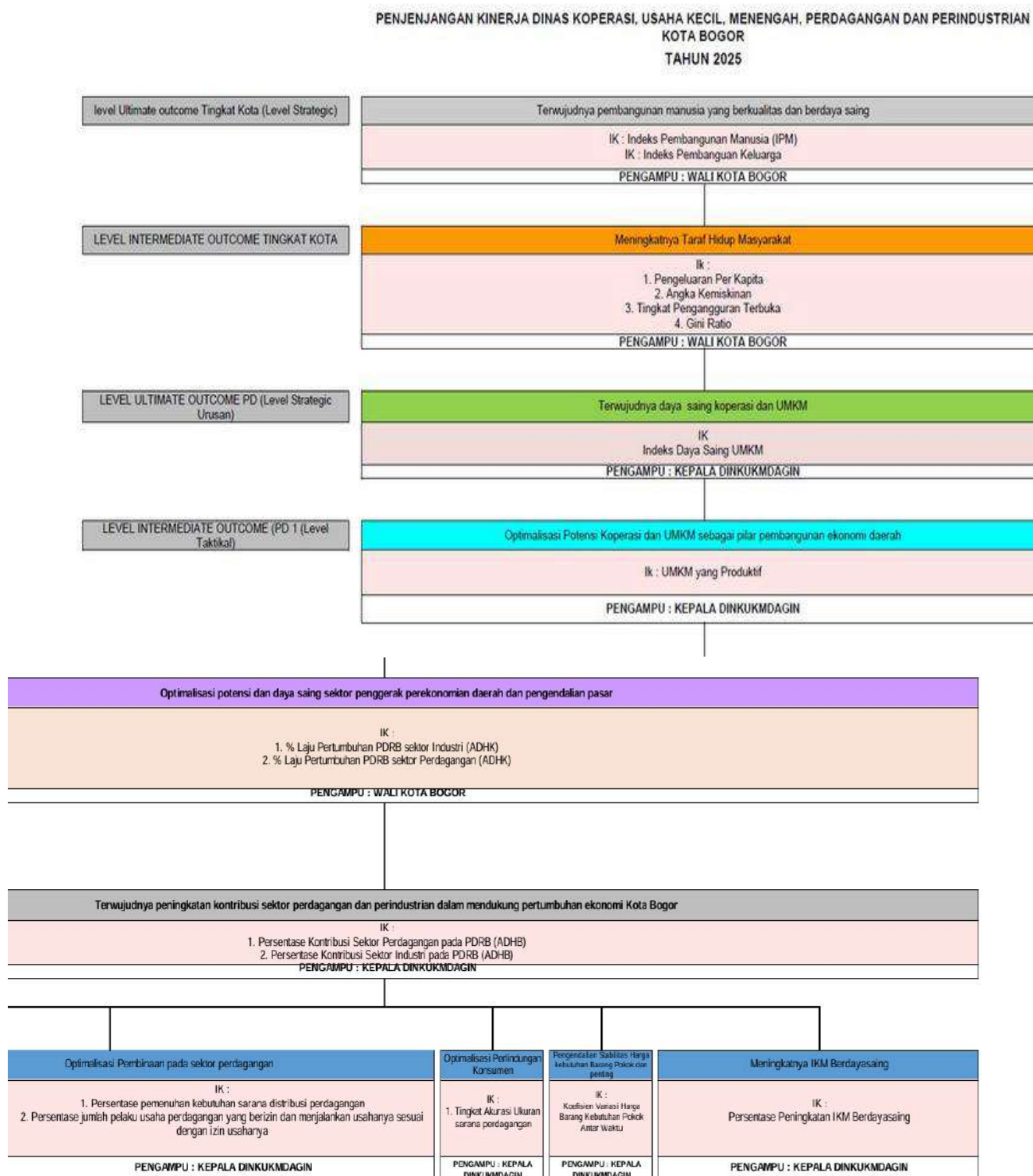
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, yang menjadi isu strategis pembangunan bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor adalah sebagai berikut

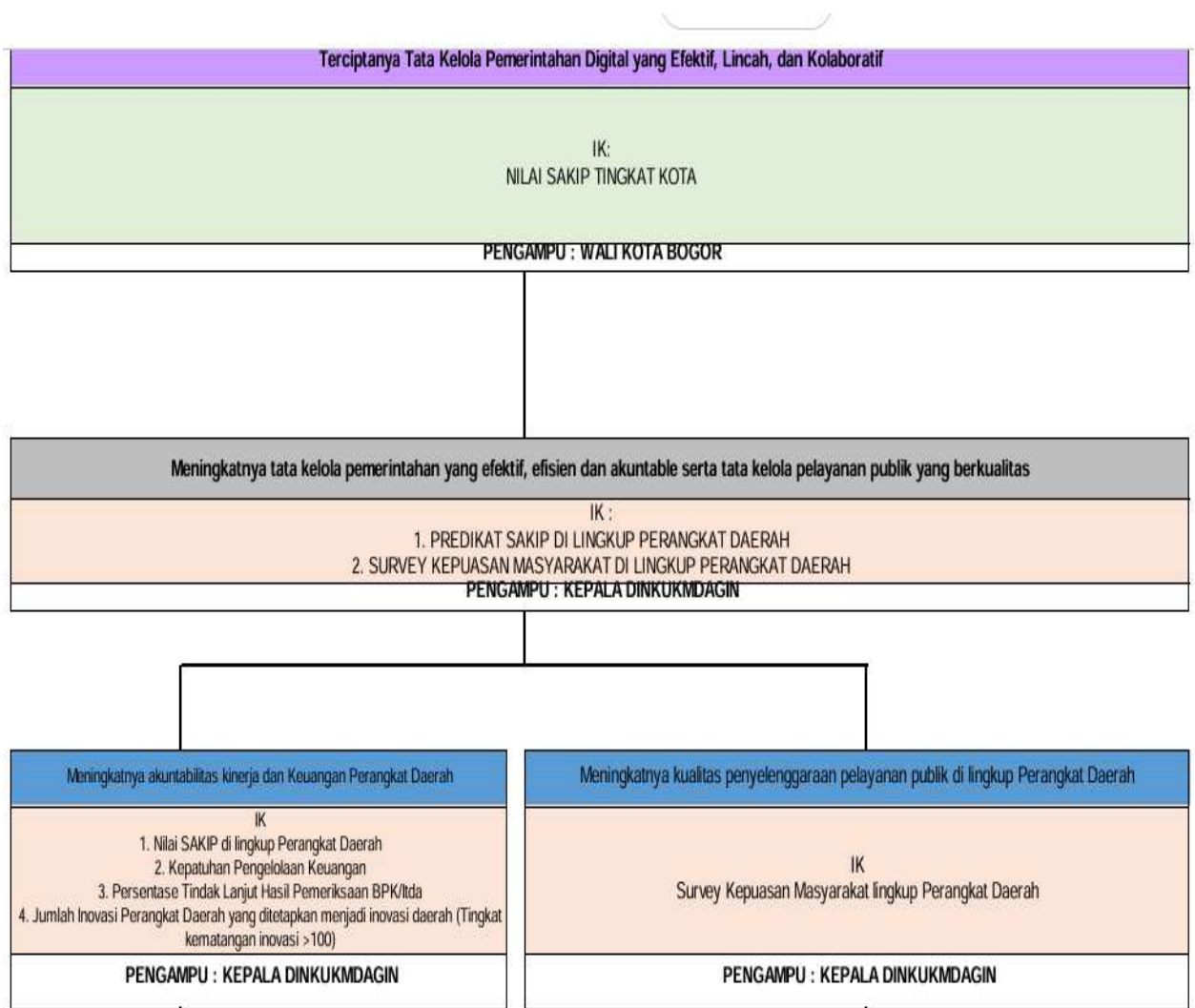
- 1) Belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif .
- 2) Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi serta usaha mikro dan kecil belum optimal
- 3) Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok,
- 4) Promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang,
- 5) Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan
- 6) Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik,
- 7) Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri,
- 8) Belum memadainya ketersediaan SDM sector industri yang kompeten dan tersertifikasi.

1.6. Cascading Kinerja (Penjengan Kinerja)

Sesuai dengan paradigma organisasi berbasis kinerja yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor, yang mana setiap Perangkat Daerah dibentuk agar memberikan kontribusi pada capaian Tujuan dan Sasaran sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yang dibentuk dengan skema kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar: 3.
Penjenjangan Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

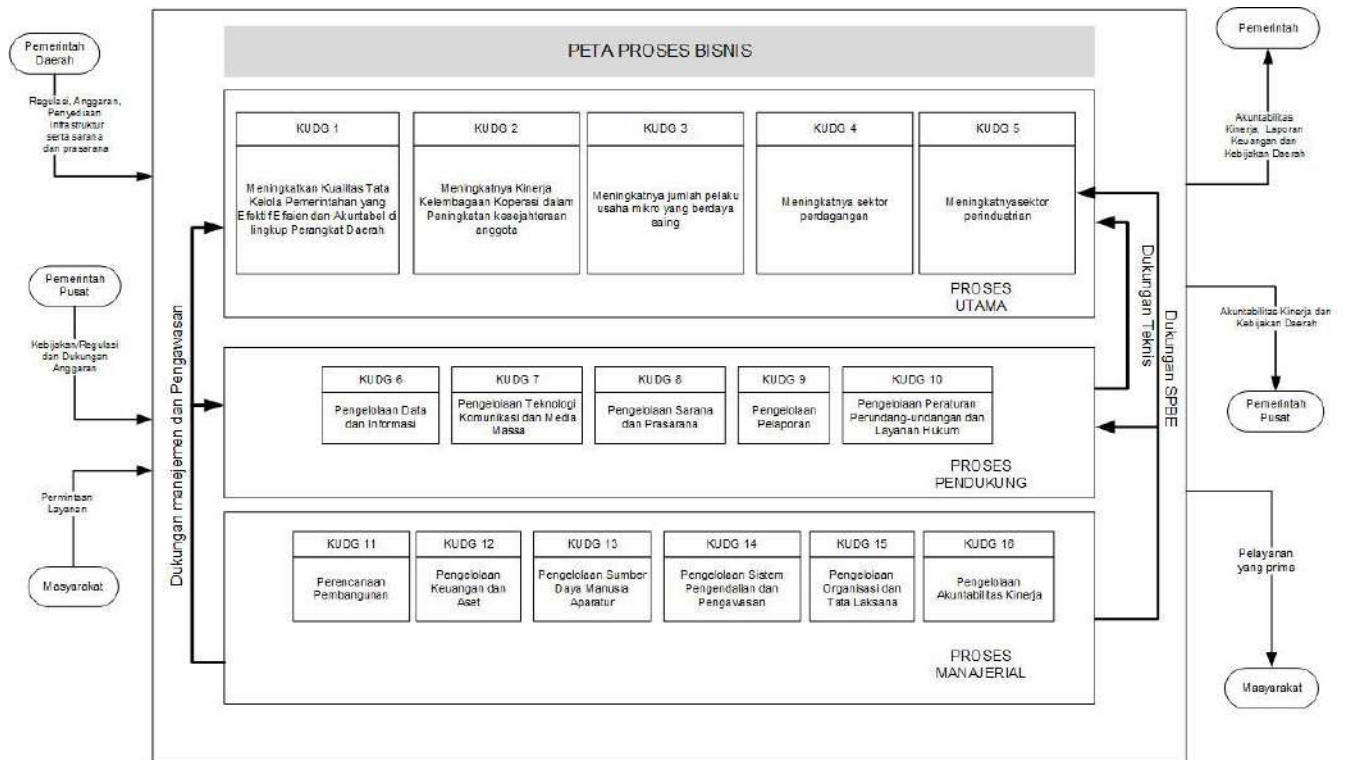




1.7. Peta Proses Bisnis

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Nomor 400.11.8/81- tentang peta proses bisnis Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, sebagai berikut:

Gambar 4. Peta Proses Bisnis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor



1.8. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025

Berikut kami sampaikan tindak lanjut saran/rekomendasi berdasarkan Surat Inspektorat Kota Bogor 700/10/VII-LHE/2025/Itda tanggal 04 Juli 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

N o	REKOMENDASI LHE 2025	TINDAKLANJUT	PENANGGUNG JAWAB	BUKTI EVIDEN	LINK EVIDEN
1	Melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama Secara berkala serta hasilnya untuk menunjukkan kondisi yang lebih baik serta Melakukan Reviu Pencapaian Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai sesuai dengan realitis	Upaya dalam melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama sudah dilakukan secara berkala dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor yaitu dengan melakukan reviu Pencapaian Target yang harus ditetapkan di tahun berikutnya	Kepala Dinas	Reviu IKU	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1awqMHdJKEQfpJ7GrmJJijk5WikLZL78B
2	Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dengan membuat Capaian Indikator Kinerja Tahun berjalan serta melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja dibawahnya secara berjenjang	Sudah dilakukan proses perubahan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 pada aplikasi SIPD	Kepala Dinas	Halaman Belanja DPA Perubahan 2025	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C-lmz6t_odnf1sLNy99dcWWrRXpmHZiK
3	Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja dengan meningkatkan upaya-upaya monitoring dan evaluasi untuk pencapaian keberhasilan kinerja	Upaya dalam memanfaatkan informasi dalam upaya monitoring dan evaluasi untuk mencapai keberhasilan kinerja yaitu dengan mengoptimalkan layanan aplikasi SADAYA	Kepala Dinas	Screen Shoot Aplikasi SADAYA	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TaGZ_CGXmKFyVbi3hFKDMryET7vKduCv

4.	Lebih mengoptimalkan pemanfaatan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan mengimplementasikan rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya	Dalam upaya perbaikan terhadap hasil evaluasi tahun sebelumnya yaitu dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Bogor	Kepala Dinas	Berita Acara Hasil Kesepakatan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan RKPDP 2025	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Rtuc2PoTKdvn-0kWyoydZ1t47z7uz4ly
----	---	---	--------------	--	---

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis yang dilaksanakan melalui kebijakan dan Program Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran rencana strategis perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor mengacu pada dokumen RPD Kota Bogor 2025-2026, dimana dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3: Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN RPD / PD	Indikator Tujuan RPD/ PD	SASARAN RPD/ PD	Indikator Sasaran RPD/PD
1.	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Meningkatnya taraf hidup Masyarakat	Angka Kemiskinan,
	1. Terwujudnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berdaya Saing	Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah	Persentase Koperasi berdaya saing
		Indeks Daya Saing UMKM		UMKM yang produktif
2.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Merata dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK), Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK),
	2. Terwujudnya peningkatan kontribusi sector perdagangan dan perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bogor	persentase kontribusi sector perdagangan pada PDRB (ADHB),	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	persentase peningkatan jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan
			Optimalisasi pembinaan pada sector perdagangan	Persentase peningkatan nilai ekspor
				persentase pemenuhan kebutuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/ sosialisasi
				sosialisasi persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya

				sesuai dengan izin usahanya
			Optimalisasi perlindungan konsumen	tingkat akurasi ukuran sarana perdagangan
			Pengendalian stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan penting	koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu;
		Persentase kontribusi sector industry pada PDRB (ADHB).	Meningkatnya IKM berdaya saing	persentase peningkatan IKM berdaya saing
3.	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Nilai SAKIP Tingkat Kota
3.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata Kelola pelayanan public	Predikat SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah
				kepatuhan pengelolaan keuangan
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK / Itda;
		Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan public di lingkup perangkat daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah.

2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi dalam hal ini Walikota kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja

tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran, sebagaimana berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja beserta Target kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Perubahan Target Tahun 2025
1.	Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah	Persentase Koperasi Berdaya Saing	17,16 Persen	18,94 Persen
		UMKM yang Produktif	133 Unit Usaha	133 Unit Usaha
2.	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan	5 Persen	5 Persen
3.	Optimalisasi Pembinaan pada Sektor Perdagangan	Persentase peningkatan nilai ekspor	11,2 persen	8,10 Persen
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/ Sosialisasi	5,80 Persen	5,80 Persen
		Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya	19,80 Persen	19,80 Persen
4.	Optimalisasi Perlindungan Konsumen	Tingkat Akurasi ukuran sarana perdagangan	31,38 Persen	31,38 Persen
5.	Terkendalnya harga kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat Inflasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		3,65 Persen
	Pengendalian stasbilitas harga kebutuhan barang pokok dan penting	Koefisien Variasi Harga Brang kebutuna pokok antar waktu	- < 9	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Perubahan Target Tahun 2025
6.	Meningkatnya IKM Berdayasaing	Persentase Peningkatan IKM Berdayasaing	20,20 Persen	20,20 Persen
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	86,99 (Nilai)	87,50 (Nilai)
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95 Persen	95 Persen
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	91 Persen	91 Persen
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat Kematangan Inovasi > 100)	1 Inovasi/ PD	1 Inovasi/ PD
8.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup perangkat daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pelayanan Daerah	88,75	88,75

Tabel 5: Program dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 255.500.000	APBD
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 356.761.000	APBD
3.	Program Pendidikan Dan Latihan Pengkoperasian	Rp. 39.040.000	APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 66.570.000	APBD
5.	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro UMKM	Rp. 8.420.000	APBD
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 177.880.000	APBD
7.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 275.325.500	APBD
8.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 32.126.000	APBD

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
9.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 51.193.200	APBD
10.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 427.107.752	APBD
11.	Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 143.188.100	APBD
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.423.549.036	APBD
Jumlah Keseluruhan.....		Rp. 18.256.660.588	APBD

2.3 Anggaran Tahun 2025

Berikut adalah Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6: Pagu Anggaran Dinas KUKMDagin Kota Bogor Tahun 2025

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	12.904.109.136	13.524.969.098	12.698.592.973	(826.376.125)	93,89
Belanja Barang Jasa	4.750.609.544	4.731.691.490	4.223.968.813	(507.722.677)	89,27
Belanja Modal					
Belanja Modal Perlatan dan MESin	0	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, JAringan dan Irigasi	0	0	0	0	0

Belanja Modal Asel lainnya	0	0	0	0	0
JUMLAH	17.654.718.680	18.256.660.588	16.922.561.786	(1.334.098.802)	

Pagu Murni pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 17.654.718.680 yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, Selanjutnya, pada Anggaran Perubahan Tahun 2025, pagu anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 18.256.660.588, yang dialokasikan untuk belanja pegawai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri No.87 Tahun 2017

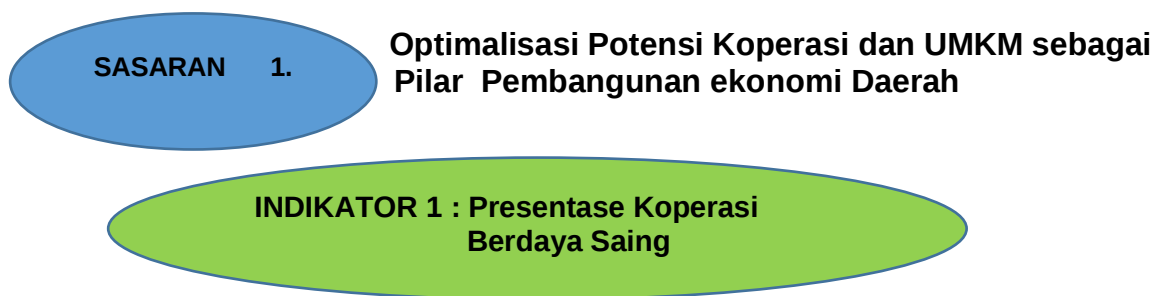
Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor tercermin dari capaian 8 (delapan) Sasaran Strategis Renstra yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8:
Capaian Kinerja Dinas KUKMDagin Kota Bogor Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah	Persentase Koperasi Berdaya Saing	18,94 Persen	17,16 Persen	90,6 Persen	Tinggi
		UMKM yang Produktif	133 Unit Usaha	134 Unit usaha	100,75 Persen	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitas promosi atau pemasaran utk peningkatan penjualan	5 Persen	16,07 Persen	321,4 Persen	Sangat Tinggi
3	Optimalisasi Pembinaan pada Sektor Perdagangan	Persentase peningkatan nilai ekspor	8,10 Persen	2,72 Persen	33,58 Persen	Sangat Rendah
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/ Sosialisasi	5,80 Persen	3,65 Persen	62,9 Persen	Rendah
		Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya	19,80 Persen	71,43 Persen	360,76 Persen	Sangat Tinggi
4	Optimalisasi Perlindungan Konsumen	Tingkat Akurasi ukuran sarana perdagangan	31,38 Persen	33,63 Persen	107,17 Persen	Sangat Tinggi
5	Terkendalnya harga kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat Inflasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3,65 Persen	4,18 Persen	114,52 Persen	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya IKM Berdayasaing	Persentase Peningkatan IKM Berdayasaing	20,20 Persen	20,6 Persen	101,98 Persen	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	87,50 (Nilai)	88,95 (Nilai)	100,71 Persen	Sangat Tinggi
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95 Persen	92,03 Persen	96,87 Persen	Tinggi
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	91 Persen	100 Persen	109,89 Persen	Sangat Tinggi

		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat Kematangan Inovasi > 100)	1 Inovasi/PD	0	0	Rendah
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pelayanan Daerah	88,75 Persen	89,38 Persen	100,71	Sangat Tinggi

Secara rinci, capaian kinerja sasaran strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor tahun 2025 , sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategia Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:



Sasaran strategis Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai Pilar Pembangunan ekonomi daerah, dimana sasaran strategis ini diukur oleh 2 (dua) Indikator , yaitu: Presentase Koperasi Berdaya Saing dan UMKM yang produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :

Gambar 5 :
Capaian Kinerja Presentase Koperasi Berdaya Saing



Kota Bogor pada Tahun 2025 dalam mewujudkan Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah dengan Indikator Presentase Koperasi Berdaya Saing yang merupakan koperasi yang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan sudah memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) .

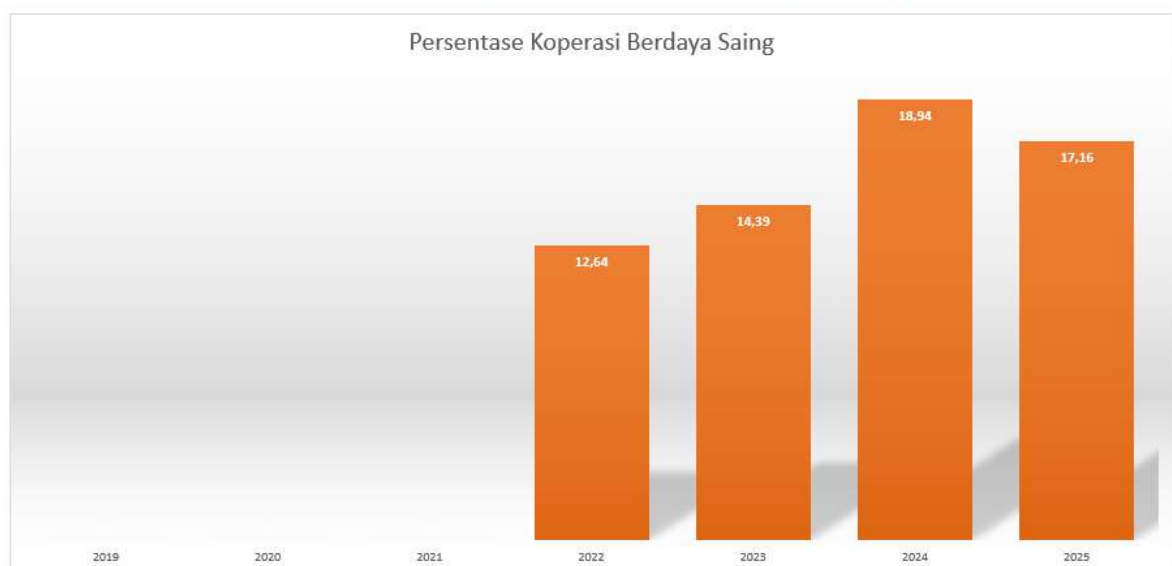
Capaian pada Tahun 2025 dari target 18,94% terealisasi sebesar 15,60% dimana indikator ini tidak mencapai target , hanya tercapai yaitu 90,60 % yang didapat melalui rumus jumlah koperasi berdaya saing/ koperasi aktif kali 100% di dapat 100 Koperasi berdaya saing di bagi 641 koperasi aktif, dengan Rumus perhitungan indikator penilaian Persentase Koperasi Berdaya Saing yaitu: Koperasi Berdaya saing dibagi Koperasi aktif di kali 100%

Pada aspek realisasi, indikator Persentase Koperasi Yang Berdaya Saing di Kota Bogor meningkat sebesar 8,94% dari Tahun 2024 , Adapun dari aspek pencapaian Koperasi yang berdaya saing lebih rendah 6,40% dari tahun 2024 yang mencapai 100% , dimana Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT dan Bersertifikat NIK sejumlah 110 Koperasi di bagi Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2018 sebanyak 641.

Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Persentase Koperasi Yang Berdaya Saing di Kota Bogor Tahun 2026 sebesar 148 UMKM , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 90,70 % UMKM.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional maupun Provinsi /Daerah Kabupaten Kota lainnya Indikator Presentase Koperasi Berdaya Saing tidak dapat dibandingkan.

Gambar 6
TREN PERKEMBANGAN INDEKS
Persentase Koperasi Berdaya Saing



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan Koperasi Yang Berdaya Saing, adalah

- Ada 4 (empat) Program dan 4 (kegiatan) Kegiatan yang mendukung Keberhasilan **Indikator Persentase Koperasi yang Berdaya saing** dengan Pagu Anggaran sebesar 717.871.000,- di mana terealisasi Rp. 630.935.000,- atau sebesar 87.89% dengan Predikat “Sangat Baik” , Program dan Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam diintervensi oleh 1 (satu) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota ;
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota,
3. Program Pendidikan dan Latihan Pengkoperasian, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pendidikan dan Latihan perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota .

Selain Anggaran , ada beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dari Indikator Persentase Koperasi yang Berdaya saing, diantaranya adalah:

- a. Fasilitasi Badan Hukum Koperasi ke Notaris bertujuan Mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kelompok masyarakat dalam rangka pendirian koperasi dan Membantu Usaha Mikro kelompok Masyarakat dalam rangka pendirian Koperasi agar mempunyai kepastian hukum dalam bentuk Badan Hukum Koperasi, kepada 68 Koperasi Merah Putih yang tersebar di 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan
- b. Melakukan pelatihan bagi para Pengawas,Ketua,Bendahara Koperasi Merah Putih;

Dalam rangka meningkatkan kinerja presentase berdaya saing di Kota Bogor pada tahun 2026 diperlukan perbaikan-perbaikan di antara nya adalah Updating Data Koperasi di Kota Bogor yang terpilah ke dalam Koperasi Aktif, Koperasi Sehat, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, sehingga dapat memudahkan melakukan Sosialisasi Perkoperasian maupun Pelatihan Koperasi.

INDIKATOR 2. UMKM Yang Produktif

UMKM produktif adalah UMKM yang memenuhi 12 indikator yang telah ditetapkan sebagai ciri UMKM produktif, yaitu: Memiliki perencanaan yang jelas , Produksi efisien dan konsisten, Keuangan tertib, Pemasaran aktif dan terukur, Inovatif dan adaptif, Manajemen SDM baik, Administrasi lengkap, Akses modal baik, Jejaring bisnis luas, Legalitas dan mutu terstandar, Pendapatan stabil atau bertumbuh, Serta berorientasi jangka panjang atau berkelanjutan.

Data Capaian Kinerja Indikator UMKM YANG PRODUKTIF, dapat tergambarkan sebagai berikut:

Gambar 7 : Capaian UMKM Kinerja Yang Produktif



Berdasarkan gambar di atas Indikator UMKM yang produktif terealisasi sebanyak 134 orang dari target 2025 sebanyak 133 orang dan tercapai sebesar 100,7% dengan perhitungan Jumlah UMKM yang Produktif dalam waktu 1 tahun berjalan, Dilaksanakan Pelatihan dan Pendampingan UMKM Produktif pada. Indikator UMKM yang produktif .

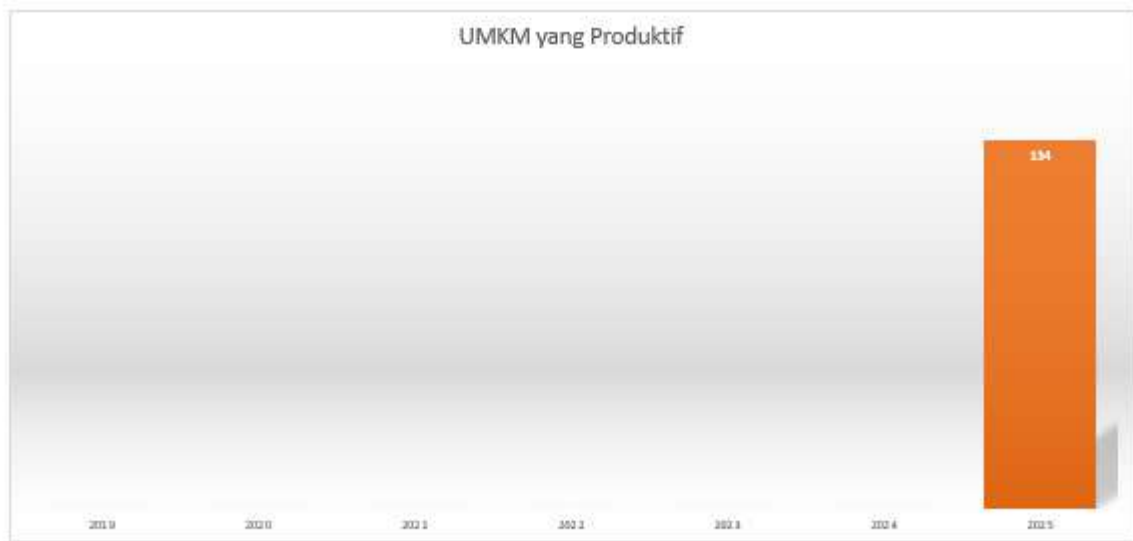
Pada aspek realisasi , aspek pencapaian dan aspek perencanaan pada Tahun 2025, tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 dimana Indikatornya adalah UMKM Naik Kelas. Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator UMKM yang Produktif Tahun 2026 sebesar 148 UMKM , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 90.54 % UMKM.

Sedangkan indikator UMKM yang produktif pada Tingkat Nasional dan Propinsi tidak ada perbandingan.

Efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 2,28% atau setara dengan Rp. 4.060.000,-. (Empat Juta Enam Puluh Ribu Rupiah). Indikator UMKM Yang Produktif ini diampu melalui ;

1. Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), yang diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan 3 (tiga) sub kegiatan , Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, yang diintervensi 1 (satu) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Gambar : 8
Trend Perkembangan Indikator UMKM Produktif



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan gambar di atas indikator UMKM yang Produktif tidak dapat dijadikan ukuran karena indikator yang berbeda setiap tahunnya.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Indikator UMKM Yang Produktif, selain UMKM memenuhi 12 indikator sebagai UMKM Produktif juga adanya :

- Motivasi Tinggi dan Komitmen dari pelaku usaha.
- Meningkatnya kemampuan dan keahlian pelaku usaha melalui pendampingan melekat dari perangkat daerah

Sedangkan upaya perbaikan pada Indikator UMKM Yang Produktif ini, sebagai berikut:

- Melakukan sinkronisasi program kegiatan lintas sektor maupun lintas perangkat daerah dan pelaku usaha lainnya
- Melakukan sinkronisasi renstra sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
- Berkolaborasi dengan pelaku usaha yang sudah besar untuk menambah daya tarik peserta agar mau mengikuti pelatihan.

SASARAN 2.

Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

INDIKATOR : Persentase peningkatan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan

Gambar 9:
Persentase peningkatan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Berdasarkan gambar di atas Indikator Persentase peningkatan jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan terealisasi sebesar 16,7% dari target 2025 sebesar 5% tercapai sebesar 321,4% dengan perhitungan Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi atau pemasaran dibagi Jumlah UMKM yang terverifikasi pada aplikasi SOLUSI dikali 100% .

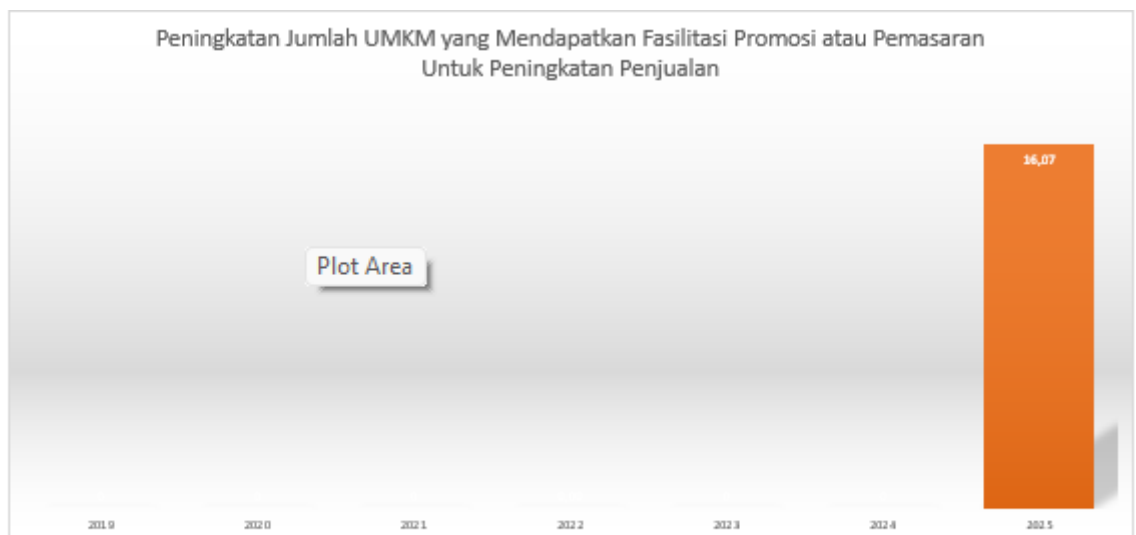
Indikator Persentase peningkatan jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan pada aspek realisasi , aspek pencapaian dan aspek perencanaan pada Tahun 2025, tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena Indikatornya berbeda..

Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Persentase peningkatan jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan Tahun 2026 sebesar 10% , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 167 %.

Sedangkan Persentase peningkatan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan pada Tingkat Nasional dan Propinsi tidak ada perbandingan.

Gambar 10.

Trend Perkembangan Peningkatan Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitas Promosi atau Pemasaran untuk Peningkatan Penjualan



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan gambar di atas indikator peningkatan jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi atau pemasaran untuk peningkatan Penjualan tidak dapat dijadikan ukuran karena inidikator yang berbeda setiap tahunnya

Indikator Persentase peningkatan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan diampu melalui ; Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, yang diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan 1 (satu) sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Indikator, Indikator Persentase peningkatan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan dapat dilihat :

1. 5 % karena di awal hanya berdasarkan target dari kegiatan yang tercantum sebanyak 120 UMKM (pelatihan dan pendampingan fasilitator e-commerce) pencapaian target 16 % dibantu oleh kegiatan2 yang dilaksanakan seperti kegiatan BISA UKM LUR yang telah mengintervensi kepada 390 UMKM selama tahun 2025 jadi ouputnya menjadi 510 UMKM yg terintervensi
2. juga dibantu dengan keikutsertaan kegiatan2 pameran2 lainnya secara mandiri selain yang telah dianggarkan dalam APBD (Inacraft, PKJB) dari 70 umkm peserta pameran menjadi 195 umkm peserta pameran

Hal tersebut membantu langsung secara teknis kegiatan promosi bagi para pelaku usaha di Kota Bogor khususnya di bidang branding, design dan promosi secara terstruktur dan continue; sehingga:

- a) Para Pelaku UMKM mendapatkan pemahaman yang koprehensif tentang strategi bisnis yang efektif yang harus segera dilakukan ;
- b) Membantu UMKM secara langsung untuk mendaptkan fasilitas literasi keungan digital (Q;Ris) dan disupervisi langsung oleh perbankan (Bank bjb);
- c) Pelaku UMKM mampu bersaing di era digital dan memanfaatkan performa usaha supervisi langsung oleh fasilitator e-commerce ; dengan aktif masuk ke dunia digital melalui media sosial IG Bisnis, WA Bisnis dan Marketplace

Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,07% atau setara dengan Rp. 20.772.139 ,-. (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

SASARAN 3

Optimalisasi Pembinaan pada Sektor Perdagangan

INDIKATOR 1: Persentase Peningkatan Nilai Ekspor

Gambar 11:
Persentase Peningkatan Nilai Ekspor



Berdasarkan gambar di atas Indikator Persentase peningkatan Nilai Ekspor terealisasi sebesar 2,72% dari target di Tahun 2025 sebesar 2,72% dan hanya tercapai sebesar 33,58% dengan perhitungan Nilai Realisasi Ekspor Tahun ke- n dikurangi Nilai Realisasi Ekspor Tahun ke (n-1) dibagi Nilai Realisasi Ekspor Tahun ke (n-1) dikali 100% .

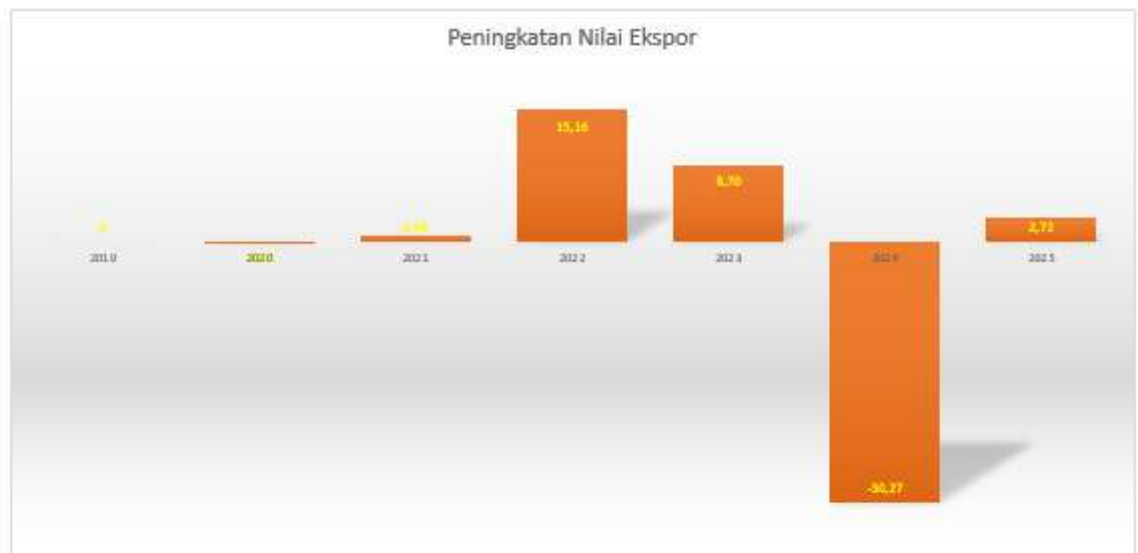
Indikator Persentase peningkatan Nilai Ekspor pada aspek realisasi , aspek pencapaian dan aspek perencanaan pada Tahun 2025, tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 dimana Indikatornya berbeda..

Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Persentase Peningkatan Nilai ekspor Tahun 2026 sebesar 14,20% , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 19,15 %.

Sedangkan pada Tingkat Nasional dan Propinsi indikator Persentase Peningkatan Nilai ekspor tidak ada perbandingan.

Program yang mendukung indikator Persentase Persentase peningkatan Nilai Ekspor adalah Program Pengembangan Ekspor dengan 1 (satu) kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 (satu) sub Kegiatan: Pameran Dagang Nasional dan Sub Kegiatan: Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Gambar 12
Trend Perkembangan Peningkatan Nilai Ekspor.



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Trend Nilai ekspor pada tahun 2026 mengalami kenaikan dari tahun 2024.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kegagalan pada pelaksanaa Indikator Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dikarenakan adanya:

- Terbakarnya PT.Agung Cipta Indah (Produk Kain Jadi);
- Pindahnya PT.Bohriner Ingelheim ke Vietnam;
- Adanya persaingan perdagangan luar Negeri;
- Pengaruh ekonomi global (adanya konflik antara rusia, Ukraina, Perang Gaza) yang berdampak kepada lama dan mahal nya pengiriman produk

INDIKATOR 2: Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/sosialisasi

Gambar 13:
Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/sosialisasi



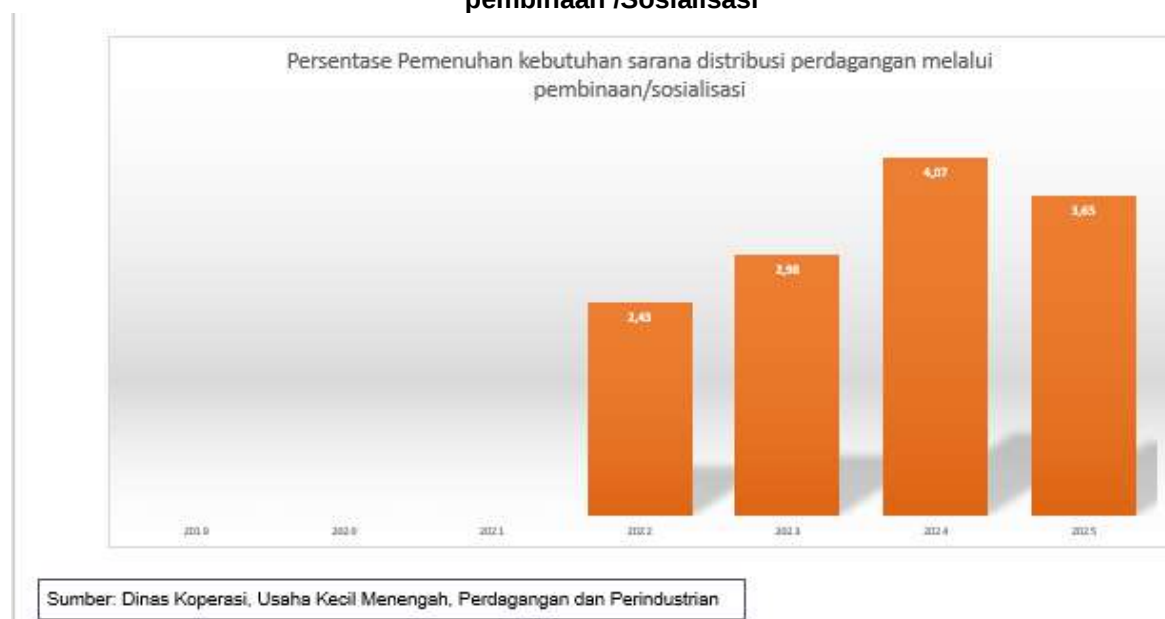
Indikator Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/sosialisasi merupakan salah satu tolok ukur optimalisasi pembinaan pada sektor perdagangan karena distribusi merupakan elemen vital dalam tata niaga, dengan besaran target 5,80 terealisasi hanya 3,65% dengan Capaian 62,9 % dengan perhitungan jumlah pembinaa/sosialisasi terhadap pelaku usaha sarana distribusi perdagangan dibagi jumlah pelaku usaha sarana distribusi perdagangan dikali 100% (126 kali pembinaan/sosialisasi) 3450 jumlah sarana distribusi perdgangan x 100%.

Dari sisi perkembangan tahunan, Indikator baru digunakan pada tahun 2025 sehingga Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan melalui Pembinaan/Sosialisasi tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Tahun sebelumnya, karena indicator ini belum digunakan sebagai tolok ukur kinerja pada tahun 2024.

Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan melalui Pembinaan/Sosialisasi Tahun 2026 sebesar 6,91% , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 52,82% .

Indikator Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan melalui Pembinaan/Sosialisasi juga belum dapat dibandingkan dengan Nasional maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Gambar : 14
Trend Persentase pemenuhan kebutuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan /Sosialisasi



Trend persentase pemenuhan kebutuhan sarana distribui perdagangan melalui pembinaan/sosialisasi mengalami kenaikan sampai tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan.

Faktor Penghambat dari Indikator ini diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran pedagang untuk mematuhi aturan penggunaan fasilitas publik atau membayar retribusi sering kali membuat hasil pembinaan tidak bertahan lama.
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas: Kurangnya jumlah personel pengelola pasar atau instruktur pembinaan menghambat pengawasan dan pendampingan yang intensif kepada pedagang.

3. Koordinasi Antar-Lembaga yang Belum Optimal: Sering terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di lapangan, serta lemahnya koordinasi antara dinas terkait dalam menindaklanjuti hasil sosialisasi.
4. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung: Pembinaan sering kali terkendala oleh kondisi fisik pasar yang buruk (sempit, sanitasi rendah), sehingga materi sosialisasi mengenai pengelolaan sarana sulit diterapkan secara praktis.
5. Resistensi terhadap Perubahan: Adanya penolakan atau aksi protes dari pedagang terhadap kebijakan baru (seperti relokasi atau penataan ulang) karena kekhawatiran kehilangan pelanggan atau biaya tambahan.
6. Kurangnya Literasi Digital dan Teknologi: Keterbatasan pemahaman pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi baru (seperti sistem laporan digital atau pemasaran online) membuat program pembinaan berbasis modernisasi sering terhambat.

Indikator Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan di dukung oleh Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.melalui aktifitas Pengawasan dan Pembinaan Gudang , Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat , Pembinaan, Pengawasan dan Pendataan Toko Swalayan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pendataan Peredaran Minuman Beralkohol dimana kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran.. Sedangkan Faktor Keberhasilan, melalui Pembinaan Kota Bogor mendapatkan Sertifikat Penghargaan sebagai Pasar Rakyat BerSNI.

Gambar: 15
Sertifikat Kesesuaian Pasar berSNI Hasil Pembinaan



INDIKATOR 3 : Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya

Persentase pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usaha sesuai izinnya biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Kalau faktor-faktor ini kuat, tingkat kepatuhan akan tinggi kalau lemah, banyak usaha jadi tidak berizin atau tidak sesuai izin.. Berikut faktor keberhasilannya: Persentase pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usaha sesuai dengan izin usahanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci yang saling berkaitan. (permohonan ijin dari pelaku usaha dibagi pelaku usaha yang sdh terbit ijinnya) Kemudahan dan kecepatan proses perizinan menjadi penentu utama. Sistem yang sederhana, transparan, dan terintegrasi secara digital akan mendorong pelaku usaha untuk mengurus izin secara resmi. Dengan kata lain kemudahan proses perizinan melalui OSS ((Online Single Submission) yang sangat membantu.para pelaku usaha.

1. Sosialisasi dan edukasi , Banyak pelaku usaha sebenarnya tidak paham pentingnya izin atau jenis izin yang dibutuhkan. Edukasi yang baik meningkatkan kesadaran dan kepatuhan;
2. Pengawasan dan penegakan hukum dan penegakan hukum Kalau ada pengawasan rutin dan sanksi tegas bagi yang melanggar, tingkat kepatuhan akan meningkat.
3. Tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha juga sangat berpengaruh. Pelaku usaha yang memahami manfaat legalitas—seperti akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan peluang kerja sama—lebih cenderung memiliki izin dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan.
4. Kelima, adanya insentif atau manfaat nyata bagi pelaku usaha berizin, seperti kemudahan akses program pemerintah atau bantuan usaha, dapat mendorong peningkatan jumlah usaha yang legal dan sesuai izin.

Gambar 16:
Persentase pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usaha sesuai izinnya



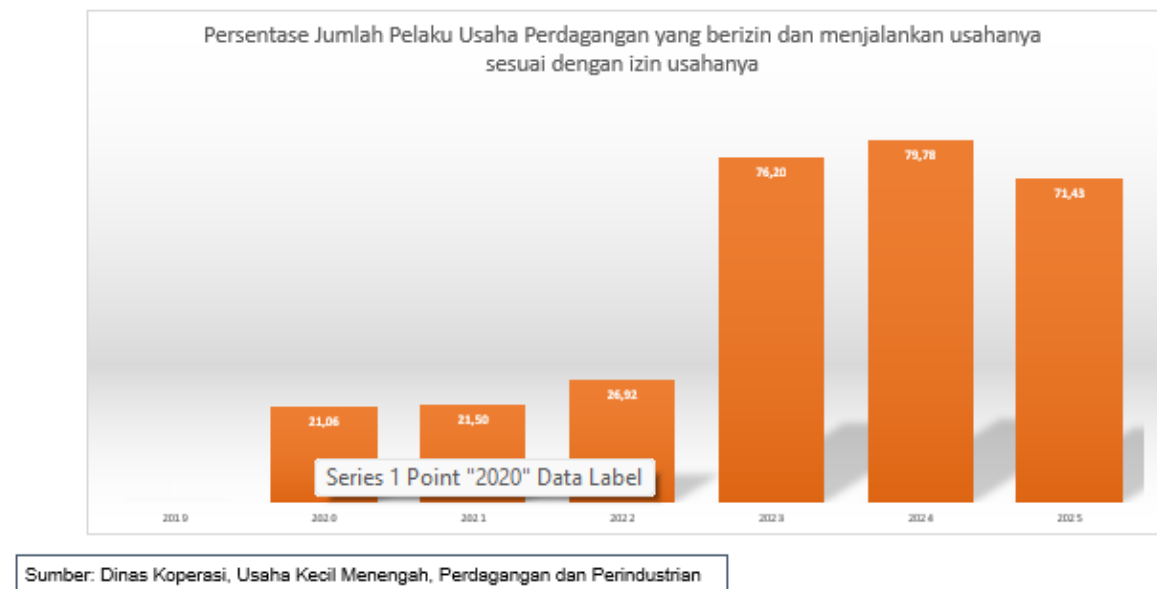
Indikator diatas merupakan salah satu tolok ukur optimalisasi pembinaan pada sektor perdagangan Dimana indicator tersebut mempunyai Target 19,80% terealisasi 71,43 % dengan Capaian 369,76% . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, definisi dari Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya adalah kebijakan sektor bidang perdagangan meliputi kebijakan, meliputi Perbitan Perizinan produksi dalam bentuk produk Perizinan yang telah terbit. Rumus Perhitungannya adalah Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang berizin dan Menjalankan Usahanya sesuai dengan izin usaha yang diterbitkan dibagi jumlah total pelaku usaha dikali 100% 31 (Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Berizin) : 42 (jumlah total pelaku usaha yang belum memiliki izin) X100%=71,43%

Dari sisi perkembangan tahunan, Indikator ini baru digunakan pada tahun 2025 sehingga Persentase Jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Tahun

sebelumnya, karena indikator ini belum digunakan sebagai tolok ukur kinerja pada tahun 2024.

Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya pada Tahun 2026 sebesar 30,69% , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 232,75 %. Indikator Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya juga belum dapat dibandingkan dengan nilai rata-rata Nasional maupun Provinsi.

Gambar 17:
Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya



Faktor pendukung diantaranya;

1. Kemudahan melakukan perizinan mellaui OSS;
2. Para pelaku usaha sudah mulai sadar akan perlunya pentingnya berizin;
3. Sosialisasi yang dilakukan secara intens oleh Perangkat Daerah selaku pembina pada pelaku usaha;

SASARAN 4

Optimalisasi Perlindungan Konsumen

INDIKATOR : Tingkat Akurasi ukuran sarana perdagangan

Gambar : 18
Tingkat Akurasi Ukuran Sarana Perdagangan



Data capaian kinerja pelaksanaan Tera/Tera Ulang Kota Bogor pada Tahun 2025 mencapai 107,17% dimana targetnya sebesar 31,38% dengan realisasi sebesar 33,63% , dengan penghitungan Jumlah UTTP yang sudah ditera/Tera Ulang tahun ke n (2025) dibagi Jumlah Potensi UTTP dikali 100%.

Pada aspek realisasi, Tingkat Akurasi Ukuran Sarana Perdagangan sebesar 33,63% pada Tahun 2025 tidak dapat di bandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan perbedaan indikator.

Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Tingkat Akurasi Ukuran Sarana Perdagangan pada Tahun 2026 sebesar 32,01% , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 105,06 %.

Program yang mendukung Indikator Tingkat Akurasi Ukuran Sarana Perdagangan adalah Program Standaisasi dan Perlindungan Konsumen dengan dukungan Anggaran Rp, 51.193.200 (Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Dua Ratus Rupiah).

Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,99% atau setara dengan Rp. 72.900,-. (Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Perbandingan realisasi kinerja Tingkat Akurasi Ukuran Sarana Perdagangan tidak dapat dibandingkan dengan Rata-Rata Nasional maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Gambar : 19
Trend Tingkat Akurasi Ukuran Sarana Perdagangan



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Trend akurasi ukuran mengalami penurunan di tahun 2025, di karenakan berkurangnya SDm dalam melkaukan Tera/Tera Ulang dan juga wilayah yang tidak terjangkau untuk dilakukan pelaksanaan Tera/Tera Ulang tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Indikator Tingkat Akurasi Ukuran Sarana Perdagangan, dapat dilihat di bawah ini:

- a. Pelaksanaan UTTP yang Wajib di tera dan tera ulang bukan hanya Kota Bogor, tapi juga di wilayah Kabupaten ;
- b. Tahun 2025 On the Spot Pelayanan Tera/Tera Ulang di 68 Kelurahan;
- c. On The Spot Pelayanan Tera/tera Ulang di 8 Pasar Tradisional;
- d. Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di kantor dan di tempat UTTP terpakai, tempat UTTP terpasang tetap, gudang dan pabrik;
- e. Melaksanakan verifikasi peralatan standar yang dilakukan secara Internal untuk Anak Timbangan Kelas M1, M2 dengan kapasitas 20 mg s/d 25 kg berjumlah 462 unit.
- f. Verifikasi eksternal peralatan standar terhadap Anak Timbangan Kelas F1, F2, M1, Timbangan Elektronik, Jangka Sorong, Gelas Ukur, Labu Ukur, Termometer Gelas, Digital Thermo-hygro, Analog Thermo-hygro dan Digital Stopwatch, Humidity Temp Baro sebanyak 73 Unit.

Hal ini menjadikan Kota Bogor melalui UPTD Metrologi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor meraih Predikat Daerah Tertib Ukur Pada Tahun 2025 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia .

Gambar : 20
Kota Bogor Sebagai Daerah Tertib Ukur Tahun 2025



SASARAN 5

Terkendalinya harga kebutuhan pokok dan barang penting

INDIKATOR : Tingkat Inflasi harga kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Gambar : 21
Capaian Kinerja 2025 Tingkat Inflasi harga kebutuhan pokok dan barang penting



Perhitungan pada aplikasi Sadaya masih menggunakan perhitungan secara umum , yaitu $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$ ($4,19 / 3,65 \times 100\% = 114,52\%$), berbeda dg hitungan sebenarnya terkait inflasi, sebagai berikut:

Data dari BPS Indeks Harga Konsumen Tahun 2025, bahwa dalam hal menentukan target inflasi barang kebutuhan pokok dan penting mengikuti dari metode Bank Indonesia, yaitu : menggunakan $\pm 1\%$ (plus minus 1%), sehingga dalam perhitungannya target yang ditetapkan $3,65 \pm 1\%$ (dalam rentang atau range 2,65% s/d 4,65%). Dengan batas atas sebesar 4,65% maka tercapai capaian kinerja sebesar 110,11%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$(4,65 - (4,18 - 4,65)) / 4,65 \times 100\% = 110,11\%$$

Pada aspek realisasi, Tingkat Inflasi Harga Kebutuhan Pokok sebesar 4,18% pada Tahun 2025 tidak dapat di bandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan perbedaan indikator.

Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Tingkat Inflasi Harga Kebutuhan Pokok pada Tahun 2026 sebesar 3,65 , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 114,52%

Demikian juga perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, BPS Pusat tidak menggunakan Indikator Tingkat Inflasi Harga Kebutuhan Pokok dalam mencapai Indikatornya sehingga realisasi Provinsi Jawa Barat pun tidak dapat dibandingkan dengan Nasional.

Gambar: 22
Trend Indikator Tingka Inflasi Harga Kebutuhan Pokok



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan Tingkat Inflasi Harga Kebutuhan Pokok, diatas dapat di simpulkan bahwa Indikator Tingkat Inflasi harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diampu oleh PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang telah dianggarkan sebesar Rp. 91.953.608,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah), kemudian mendapatkan penambahan anggaran berupa pengalihan efisensi anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah sebanyak Rp. 335.154.144,- (tiga ratus tiga puluh lima juta serratus lima puluh empat ribu serratus empat puluh empat rupiah), sehingga total anggaran menjadi Rp. 427.107.752,- (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), terdapat 3 (tiga) bagian kegiatan sepanjang tahun 2025, yaitu : Operasi Pasar Khusus, Operasi Pasar Murah Bersubsidi (OPADI) dan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok dan Rumah Tangga:

- a. Pendampingan kegiatan Operasi Pasar Murah Bersubsidi (Opadi) menjelang hari raya lebaran (didukung anggaran). Total Subsidi Rp. 73.800,-. Sedangkan, Nilai Penjualan Rp. 72.000,- / paket. Masyarakat mendapatkan harga lebih murah sebesar Rp. 73.800, dikarenakan disubsidi oleh Pemerintah Provinsi.
- b. Pelaksanaan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok dan Rumah Tangga Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok dan Rumah Tangga dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Oktober 2025 sebanyak 60 (enam puluh) kali dari yang direncanakan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kali di Tahun 2025

Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,13% atau setara dengan Rp. 58.827.752 ,-. (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

SASARAN 6

Meningkatnya IKM Berdayasaing

**INDIKATOR : Persentase Peningkatan
IKM BerdayaSaing**

Berdaya saing adalah kemampuan individu, perusahaan, daerah, atau negara untuk menghasilkan nilai tambah, kualitas, dan produktivitas yang lebih tinggi dibanding pesaingnya secara berkelanjutan. Ini mencakup keunggulan kompetitif, inovasi, dan adaptabilitas terhadap perubahan global, terutama dalam konteks SDM yang terampil, teknologi, dan ekonomi.

Poin-Poin Utama Berdaya Saing:

- 1) Karakteristik: Memiliki keterampilan tinggi, keunggulan kompetitif, karakter kuat, dan inovatif.
- 2) Konteks SDM/Individu: Individu yang berdaya saing memiliki mindset bertumbuh, proaktif, mampu bekerja sama, dan menguasai teknologi.
- 3) Konteks Ekonomi/Bisnis: Perusahaan/daerah mampu menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik dengan biaya efisien dibanding pesaing.
- 4) Tujuan: Menciptakan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan, dan relevan dengan tuntutan globalisasi.

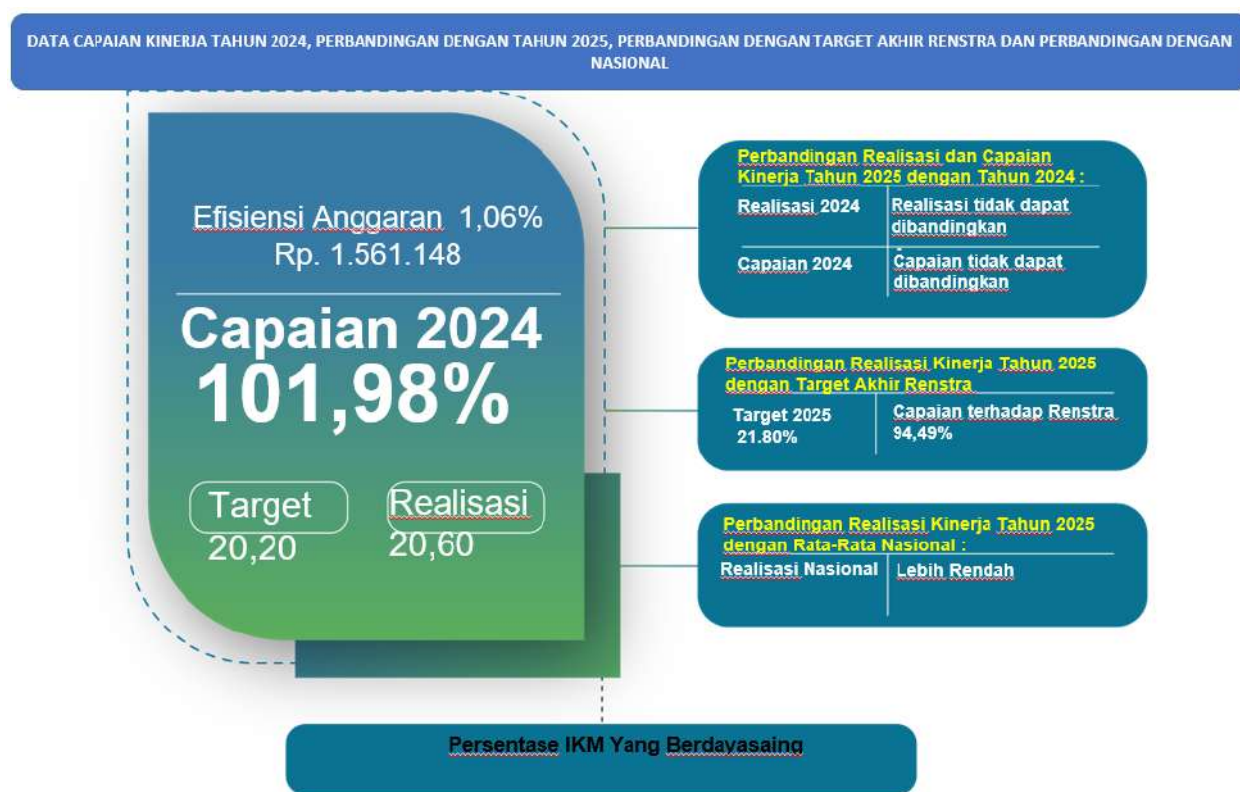
IKM (Industri Kecil dan Menengah) Berdaya Saing adalah badan usaha produktif yang memiliki kemampuan menghasilkan produk berkualitas, inovatif, dan sesuai standar (SNI/sertifikasi) sehingga mampu tumbuh, naik kelas, dan bersaing di pasar domestik maupun global. IKM ini unggul dalam kualitas, efisiensi, serta mampu beradaptasi dalam rantai pasok local

Berikut adalah karakteristik dan aspek kunci dari IKM Berdaya Saing:

- **Kualitas & Standarisasi:** Produk memiliki standar mutu yang diakui (misal: SNI, sertifikasi halal, atau sertifikasi keamanan produk).
- **Inovasi & Nilai Tambah:** Mampu meningkatkan nilai produk melalui kreativitas dan teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman.
- **Manajemen Modern & Digitalisasi:** Pengelolaan usaha yang terstruktur, termasuk penerapan digitalisasi keuangan dan pemasaran.

- Keberlanjutan & Legalitas: Memiliki perlindungan kekayaan intelektual (HAKI) dan beroperasi secara sah.
- Akses Pasar: Mampu menembus pasar yang lebih luas dan masuk ke dalam rantai pasok industri.

Gambar : 23
Capaian Kinerja IKM Berdaya Saing

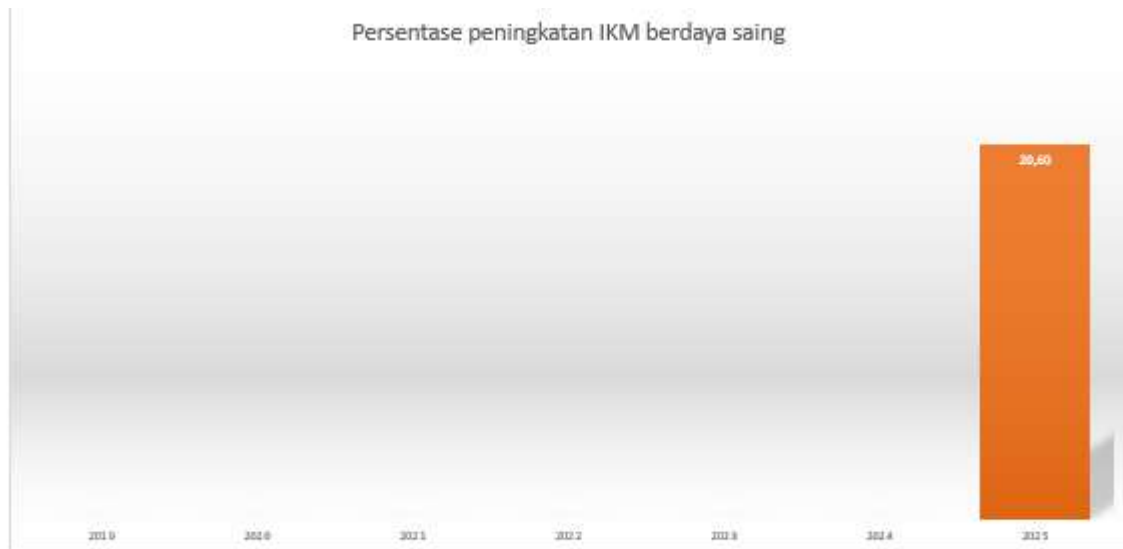


Persentase IKM Berdayasaing pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dari target 20,20 Persen mencapai 101,98% dari realisasi 20,60% hal ini dikarenakan intensnya fasilitasi bagi para IKM melalui pelatihan yang di adakan oleh Dinas maupun Kementerian .

Pada aspek realisasi, Indikator Persentase IKM yang Berdayasaing sebesar 20,60% pada Tahun 2025 tidak dapat di bandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan perbedaan indikator. Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Persentase IKM yang berdayasaing pada Tahun 2026 sebesar 21,80% , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 94,49%

Sedangkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, tidak menggunakan Indikator Persentase IKM yang Berdayasaing dalam mencapai Indikatornya sehingga realisasi Provinsi Jawa Barat pun tidak dapat dibandingkan dengan Nasional.

Gambar : 24
Trend Persentase IKM yang berdayasaing



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan gambar di atas indikator Persentase IKM yang berdaya saing tidak dapat dijadikan ukuran karena indikator yang berbeda setiap tahunnya

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan Indikator IKM Yang Berdayasaing;

Melakukan Koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat /provinsi/lembaga dan akademisi untuk bekerjasama melakukan pelatihan dan fasilitasi IKM kota bogor.

Dalam rangka mengaklerasi kinerja Indikator Persentase IKM Yang berdayasaing diperlukan perbaikan-perbaikan intervensi antara lain : Mendapatkan dukungan anggaran untuk bidang industri agar lebih banyak sasaran yg akan mendapatkan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi.

Program yang mendukung Indikator IKM Berdaya Saing adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebesar Rp. 143.155.100,- Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,98% atau setara dengan Rp. 1.516.148,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

SASARAN 7

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

INDIKATOR 1. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan keuangan di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah, Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah, Kepatuhan Pengelolaan Keuangan, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida, dan Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 25:
Capaian Kinerja Indikator Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah



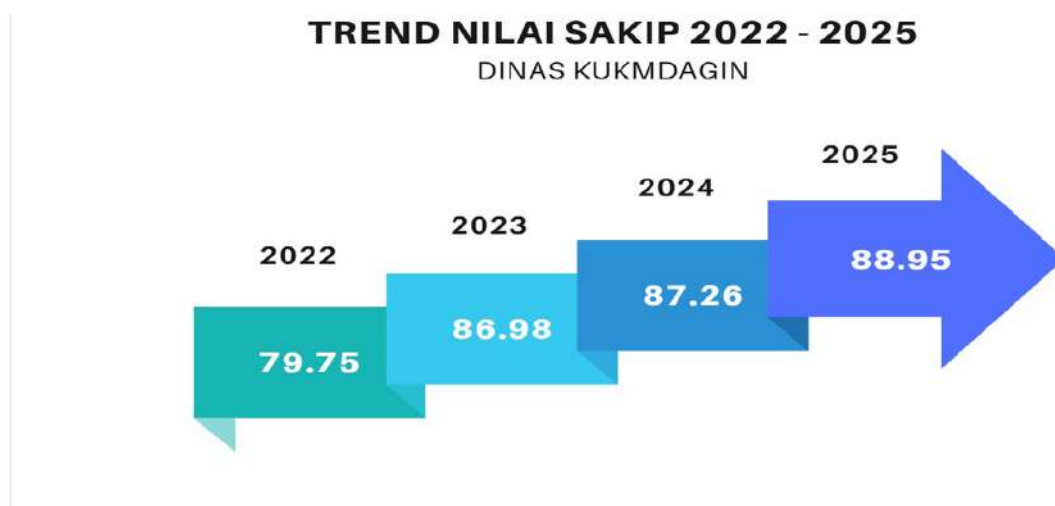
Nilai sakip perangkat daerah digunakan untuk mengukur Tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Nilai sakip diukur dan dipublikasikan oleh Inspektorat Kota Bogor. Pada tahun 2025, realisasi nilai sakip mencapai 88,95 dari target yang ditetapkan sebesar 87,50 sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,71%..

Pada aspek realisasi, nilai sakip Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor (Berdasarkan LHE AKIP Inspektorat) mengalami peningkatan sebesar 1,69 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 87,26 pada tahun 2024 menjadi 88,94 pada tahun 2025. Sedangkan pada segi pencapaian kinerja terjadi penurunan 0,99% dari tahun 2024, sebesar 108,5 menjadi 100,71 pada Tahun 2025

Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2026 sebesar 87 point , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 102,2 %%%

Sedangkan, perbandingan kinerja Indikator Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar 75,49 dimana indikator Kota Bogor lebih tinggi sebesar 17.83%. .

Gambar : 26
Trend Nilai SAKIP Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor



Faktor Tercapainya target Indikator Nilai SAKIP di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor tahun 2025 adalah adanya peningkatan pada beberapa komponen evaluasi, yaitu :

- 1) Komponen Penilaian Pelaporan Kinerja mengalami peningkatan dari 11,40 di tahun 2024 menjadi 12,60 di tahun 2025 sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,9;
- 2) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mengalami peningkatan juga dari 21,25 di Tahun 2024 menjadi 21,75 di tahun 2025 sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,97

Sedangkan faktor yang menghambat pencapaian nilai AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor tahun 2025 adalah tidak tercapainya komponen:

- 1) Perencanaan Kinerja dimana tidak ada peningkatan di tahun 2025 sebesar 27,60 sama dengan evaluasi di tahun 2024;
- 2) Pengukuran Kinerja dimana tidak ada peningkatan di tahun 2025 sebesar 27,60 sama dengan evaluasi di tahun 2024.

Terhadap kekurangan – kekurangan tersebut untuk dapat diperbaiki pada Tahun 2026 akan menindaklanjuti rekomendasi dari LHE Inspektorat kepada Dinas Koperasi , Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor untuk:

- a. Melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama Secara berkala serta hasilnya untuk menunjukan kondisi yang lebih baik serta Melakukan Reviu pencapaian Target yang di tetapkan dalam Perencanaan kinerja dapat dicapai sesuai dengan realitas .
- b. Melakukan perbaikan /penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dengan membuat Capaian
- c. Indikator Kinerja Tahun berjalan serta melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja di bawahnya secara berjenjang
- d. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja dengan meningkatkan upaya-upaya monitoring dan evaluasi untuk pencapaian keberhasilan kinerja

- e. Lebih mengoptimalkan pemanfaatan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan mengimplementasikan rekomendasi hasil evaluasi

Program yang mendukung pencapaian nilai saki di lingkup Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota . Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai 0,07% atau setara dengan Rp. 1.161.513.863 yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.423.549.036 , terealisasi sebesar Rp. 15.262.035.173

INDIKATOR 2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

Gambar : 27
Capaian Kinerja Kepatuhan Pengelola Keuangan



Indikator Kepatuhan Pengelola Keuangan Tahun 2025 merupakan salah satu tolok ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah yang diperoleh dari hasil penilaian terhadap penyerapan anggaran pada tahun berjalan dengan penyampaian laporan keuangan yang tepat pada waktu yang ditentukan, dari target 95% terealisasi sebesar 92,03 % dengan capaian 96,87%

Dari sisi perkembangan tahunan, Tingkat kepatuhan anggaran tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Tahun sebelumnya, karena indikator ini belum digunakan sebagai tolok ukur kinerja pada tahun 2024. Indikator ini baru digunakan pada tahun 2025.

Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pada Tahun 2026 sebesar 95% , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 belum melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 93,84%

Indikator ini juga belum dapat dibandingkan dengan rata-rata Nasional maupun Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

Gambar: 28
Trend Kepatuhan Keuangan



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

INDIKATOR 3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda

Indicator di atas merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, Dimana indicator tersebut merujuk pada rekomendasi atau temuan atas hasil pemeriksaan BPK/ Itda yang ditindaklanjuti dan oleh Perangkat Daerah, dengan target 91% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga tercapai diatas 100% yaitu dengan nilai 109,89% .

Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

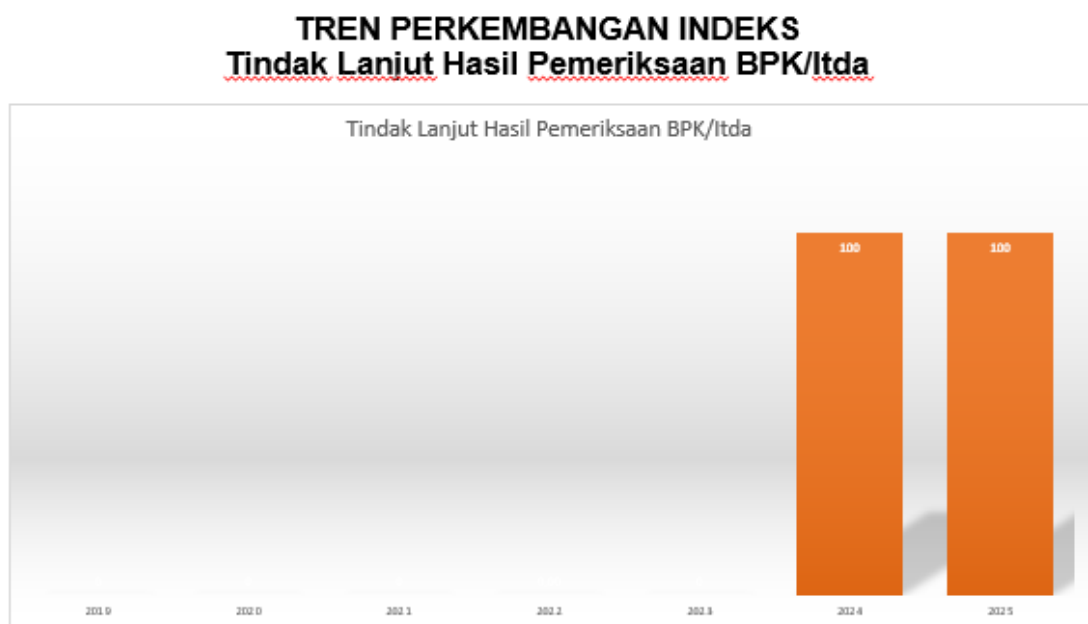
Gambar : 29
Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda



Dari sisi perkembangan tahunan, presentase tindak lanjut Pemeriksaan BPK/Itida yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100%. Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan BPK/Itida pada Tahun 2026 sebesar 92% , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 108,6%

Apabila dibandingkan dengan target nasional maupun propinsi , indicator perkembangan Indeks Tindak lanjut hasil Pemerksanaan BPK/Itida ini tidak dapat dibandingkan .

Gambar: 30
Trend perkembangn Indeks Tindak lanjut hasil Pemeriksanaan BPK/Itida



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Trend perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/Itida selama kurun waktu 2 (dua) tahun masih tetap mencapai 100% dikarenakan Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah , Perdagangan dan Perindustrian melakukan tindak lanjut hasil temuan / pemeriksaan tepat waktu.

**INDIKATOR 4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah
Yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah
(tingkat kematangan Inovasi > 100)**

Indikator di atas merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah. Pelaksanaan pengukuran nilai kematangan inovasi Perangkat Daerah ini didasarkan pada::

1. Kebijakan nasional mengenai Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun
2. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan inovasi daerah melalui Pengukuran IID kepada Kementerian Dalam Negeri
3. Inovasi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan minimal 1 (satu) inovasi dengan nilai kematangan paling rendah 100 (seratus)

Salah satu Inovasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, salah satunya Adalah BISA UKM LUR yaitu Berbagi Strategi Usaha Untuk UKM di Kelurahan dengan Target 1 inovasi/Perangkat Daerah/tahun , diimana Nilai Kematangan inovasi harus diatas >100 , maka Indikator ini tidak dapat terealisasi dikarenakan Nilai Tingkat Kematangan Inovasi BISA UKM LUR pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor tahun 2025 hanya tercapai dengan Nilai 60. Hal ini terjadi karena beberapa Faktor:

- 1) Inovasi BISA UKM LUR belum berjalan selama 2 tahun (baru 1 tahun pelaksanaan yang dimulai tahun 2024) sesuai dengan kriteria dari Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID);
- 2) Inovasi BISA UKM LUR dalam pelaksanaannya belum didukung oleh Anggaran APBD (Non ABD) namun bekerjasama dengan stake holder lainnya (CSR) akan tetapi inovasi tetap bisa dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan tujuan dan manfaatnya;
- 3) Masih terdapat nilai yang belum optimal dalam pengukuran indeks Inovasi Daerah (IID) karena terdapat beberapa indikator yang baru bisa terpenuhi apabila program ini telah berjalan lebih dari 2 tahun

Capaian Kinerja dari Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (tingkat kematangan Inovasi > 100) dapat dilihat dibawah ini

Gambar: 31
Capaian Kinerja Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (tingkat kematangan Inovasi > 100)



Dari sisi perkembangan tahunan, Indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Tingkat kematangan Inovasi >100) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Tahun sebelumnya, karena indikator ini belum digunakan sebagai tolok ukur kinerja pada tahun 2024.

Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yag di tetapkan menjadi Inovasi daerah (tingkat kematangan Inovasi >100) pada Tahun 2026 sebesar 2 Inovasi/OPD , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 belum melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 0 %

Sedangkan, perbandingan kinerja Indikator ini dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat belum dapat dilakukan karena belum tersedia data final, begitu pun dengan Tingkat Rata-Rata Nasional.

Gambar 32:
Trend Jumlah Inovasi Perangkat Daerah



SASARAN 8

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

INDIKATOR : Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pelayanan Daerah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator yang merupakan salah satu tolok ukur meningkatnya kualitas penyelenggaraan kinerja dan keuangan perangkat daerah adalah capaian Survey kepuasan Masyarakat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, dimana Indikator ini mempunyai target sebesar 88,75 % dengan realisasi 89,38% sehingga mempunyai capaian sebesar 100,71%.

Indikator Survey Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang menggambarkan Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor. Survey Kepuasan Masyarakat ini baru diterapkan pada tahun 2024 di UPTD Metrologi, baru kemudian pada tahun 2005 di terapkan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

Capaian Indikator dapat dilihat pada gambar di bawah :

Gambar : 33
Capaian Indikator Survey Kepuasan Masyarakat

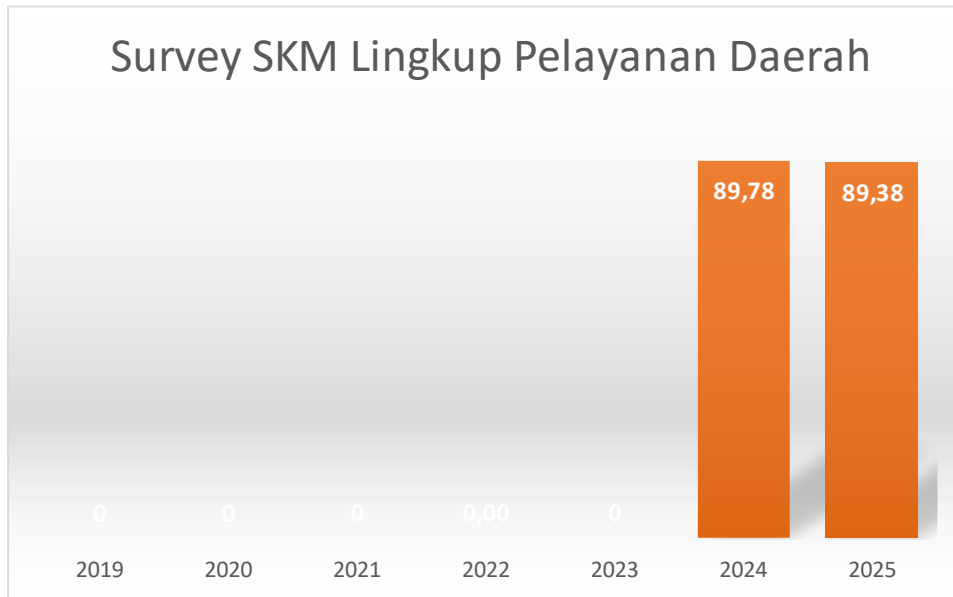


Dari sisi perkembangan tahunan, Indikator Survey kepuasan Masyarakat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Tahun sebelumnya, karena indikator ini belum digunakan sebagai tolok ukur kinerja pada tahun anggaran 2024.

Dalam perpektif jangka menengah , Target Indikator Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Kepala Daerah Perangkat Daerah pada Tahun 2026 sebesar 89,25 , dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra /RPD Tahun 2026 dengan ketercapaian sebesar 100,1 %

Indikator ini juga belum dapat dibandingkan dengan Nasional maupun Provinsi.

Gambar : 34
Trend Survey SKM



Trend survey Survey Kepuasan Masyarakat, mengalami penurunan 0,40 point hal ini disebabkan oleh cara penilaian yang mengalami perubahan, dimana pada Tahun 2024 kami hanya menghitung SKM pada UPTD Metrologi saja sedangkan pada Tahun 2025 kami menghitung keseluruhan pada Perangkat Daerah

3.2 Realisasi Anggaran Keuangan berdasarkan Sasaran

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor selama Tahun 2025 di dukung oleh, baik yang berdampak langsung maupun tidak berdampak langsung. Secara umum, pelaksanaan Program-Program yang mendukung setiap sasaran dapat terlaksana dengan baik. Besaran Anggaran yang menunjang semua sasaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sebesar Rp. 18.256.660.568,- dengan Capaian Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Desember 2025 sebesar Rp. 16.922.561.786,- atau mencapai 92.69%:

Tabel 9: Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025

No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah	Persentase Koperasi Berdaya Saing	Persen	18,94 Persen	17,16 Persen	90,6 Persen	717.871.000	630.935.000	87,89
		UMKM yang Produkti	Unit Usaha	133 Unit Usaha	134 Unit usaha	100,75 Persen	186.300.000	181.840.000	97.61
2.	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran utk peningkatan penjualan	Persen	5 Persen	16,07 Persen	321,4 Persen	307.451.500	286.679.361	93.24
3.	Optimalisasi Pembinaan pada Sektor Perdagangan	Persentase peningkatan nilai ekspor	Persen	8,10 Persen	2,72 Persen	33,58 Persen	32.126.000	24.926.000	77.59

No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Optimalisasi Perlindungan Konsumen	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/ Sosialisasi	Persen	5,80 Persen	3,65 Persen	62,9 Persen	0	0	0
		Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya	Persen	19,80 Persen	71,43 Persen	360,76 Persen	0	0	0
		Tingkat Akurasi ukuran sarana perdagangan	Persen	31,38 Persen	33,63 Persen	107,17 Persen	51.193.200	51.12.000.	99.86
5.	Terkendalnya harga kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat Inflasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	3,65 Persen	4,18 Persen	114,52 Persen	427.107.752	368.280.000	86,23

No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.	Meningkatnya IKM Berdayasaing	Persentase Peningkatan IKM Berdayasaing	Persen	20,20 Persen	20,6 Persen	101,98 Persen	143.188.100	141.671.952	98.94
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	87,50 (Nilai)	88,95 (Nilai)	100,71 Persen	0	0	0
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	95 Persen	92,03 Persen	96,87 Persen	18.256.660.588	16.922.561.786.	92.69
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Persen	91 Persen	100 Persen	109,89 Persen			

No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat Kematangan Inovasi > 100)	Inovasi	1 Inovasi/PD	0	0	0	0	0
		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pelayanan Daerah	Persen	88,75 Persen	89,38 Persen	100,71	0	0	0

3.3. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pada laporan kinerja didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai lebih dari 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 8 (delapan) Sasaran yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ada terdapat 8 (delapan) sasaran yang capaian kinerjanya mencapai/melebihi target dengan tingkat efisiensi sebesar yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Kinerja **Sasaran Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah** dengan Indikator UMKM yang produktif terealisasi sebanyak 134 orang dari target 2025 sebanyak 133 orang dan tercapai sebesar 100,7% dengan perhitungan Jumlah UMKM yang Produktif dalam waktu 1 tahun berjalan, Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 2,28% atau setara dengan Rp. 4.060.000,- (Empat Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
2. Tercapainya Kinerja Sasaran **Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri** dengan Indikator Persentase peningkatan jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan terealisasi sebesar 16,7% dari target 2025 sebesar 5% tercapai sebesar 321,4% dengan perhitungan Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi atau pemasaran dibagi Jumlah UMKM yang terverifikasi pada aplikasi SOLUSI dikali 100% .Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,07% atau setara dengan Rp. 20.772.139 ,-. (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
3. Tercapainya Kinerja Sasaran **Optimalisasi Perlindungan Konsumen** dengan indikator Tingkat Akurasi ukuran sarana perdagangan Data capaian kinerja pelaksanaan Tera/Tera Ulang Kota Bogor pada Tahun 2025 mencapai 107,17% dimana targetnya sebesar 31,38% dengan realisasi sebesar 33,63% , dengan penghitungan Jumlah UTTP yang sudah ditera/Tera Ulang tahun ke n (2025) dibagi Jumlah Potensi UTTP dikali 100%.Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,99% atau setara dengan Rp. 72.900,-. (Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

4. Tercapainya Kinerja ***Terkendalinya harga kebutuhan pokok dan barang penting*** dengan Indikator Tingkat Inflasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting , dimana Perhitungan pada aplikasi Sadaya masih menggunakan perhitungan secara umum , yaitu $\text{Realisasi / Target} \times 100\%$ (4,19/3,65x100% = 114,52%) Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,13% atau setara dengan Rp. 58.827.752 ,-. (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah
5. Tercapainya Kinerja Sasaran ***Meningkatnya IKM Berdayasaing*** dengan Persentase IKM Berdayasaing pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dari target 20,20 Persen mencapai 101,98% dari realisasi 20,60% hal ini dikarenakan intensnya fasilitasi bagi para IKM melalui pelatihan yang di adakan oleh Dinas maupun Kementerian Sedangkan efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 0,98% atau setara dengan Rp. 1.516.148,-. (Satu Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
6. Tercapainya Kinerja Meningkatnya ***Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah*** dengan Indkator Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah , Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah , Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada Tahun 2025 memperoleh nilai 88,95 dengan kriteria A (Memuaskan), sedangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya (2024) mendapatkan nilai sebesar 87,26 dengan kategori A (memuaskan), dengan tidak adanya anggaran ;
7. Tercapainya Kinerja ***Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah*** dengan Indikator Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pelayanan Daerah tercapai sebesar 100,71 % dari target 88,755 dan relaisasi 89,38 Persen, dengan tidak adanya anggaran.
8. Tercapainya Kinerja ***Optimalisasi Pembinaan pada Sektor Perdagangan*** dengan indikator Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya tersebut mempunyai Target 19,80% terealisasi 71,43 % dengan Capaian 369,76%, tanpa adanya anggaran

Sedangkan ada 2 (dua) Sasaran yang tidak tercapai, yaitu:

- 1) ***Optimalisasi pembinaan pada sector perdagangan dengan indikator persentase peningkatan Nilai ekspor*** pada tahun 2025 mengalami penurunan Kinerja, dimana dari target 8,10% hanya terealisasi 2,72% dengan Capaian 33,58% yang masuk dalam kriteria Sangat Rendah, hal ini disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan ekspor terganggu sehingga penilaian ekspor mengalami penurunan.
- 2) ***Optimalisasi pembinaan pada sector perdagangan dengan Indikator Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/sosialisasi*** merupakan salah satu tolok ukur optimalisasi pembinaan pada sector perdagangan karena distribusi merupakan elemen vital dalam tata niaga, dimana ditargetkan sebesar 5,80% terealisasi sebesar 3,65% dengan Capaiannya hanya 62,9 %, tanpa adanya anggaran
- 3) ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Tingkat kematangan Inovasi >100)***, maka Indikator ini tidak dapat terealisasi dikarenakan Nilai Tingkat Kematangan Inovasi BISA UKM LUR pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor tahun 2025 hanya tercapai dengan Nilai 60. Hal ini terjadi karena beberapa Faktor: Inovasi BISA UKM LUR belum berjalan selama 2 tahun (baru 1 tahun pelaksanaan yang dimulai tahun 2024) sesuai dengan kriteria dari Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID); Inovasi BISA UKM LUR dalam pelaksanaannya belum didukung oleh Anggaran APBD (Non ABD) namun bekerjasama dengan stake holder lainnya (CSR) akan tetapi inovasi tetap bisa dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan tujuan dan manfaatnya dan Masih terdapat nilai yang belum optimal dalam pengukuran indeks Inovasi Daerah (IID) karena terdapat beberapa indikator yang baru bisa terpenuhi apabila program ini telah berjalan lebih dari 2 tahun

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran berikut indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dari hasil analisis kinerja, capaian kinerja pencapaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) Sasaran yang mencapai kinerja lebih baik yang dicapai melalui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi serta kolaborasi,

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian visi dan misi Kota Bogor, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sebagai perumus kebijakan, koordinator pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang tidak dilakukan penilaiannya oleh instansi vertikal, baik kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Secara internal perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bagian sehingga dapat integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sehingga dapat terlaksana dengan optimal.

Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ini dibuat sebagai salah satu kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemangku jabatan, khususnya dalam hal ini oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.